



www.kemhan.go.id
www.dmc.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA

Volume 54 /No. 38/Mei-Juni 2015

ILMU PERTAHANAN DAN PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

QUO VADIS: THE ROLE OF THE STATE DEFENSE (CONSULAR)
TO GUARANTEE CITIZENS' PROTECTION AND SAFETY, WHO
EXPERIENCE EMERGENCIES ABROAD

FILM THE IMITATION GAME MENGINSPIRASI
NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

BHINNEKA TUNGGAL IKA (UNITY IN DIVERSITY)

KENAPA ISTILAH "彭YANDANG CACAT" DIGANTI
MENJADI "彭YANDANG DISABILITAS"?

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

Dua Bahasa

Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman, salam hangat dari Redaksi "WIRA".

Kembali tim redaksi WIRA edisi Mei-Juni 2015 ini menyiapkan artikel menarik mengenai Ilmu pertahanan dan bela negara, quo vadis pertahanan negara dan pentingnya nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika serta resume film "*Imitation Game*", sebuah film yang mengungkap jasa dan nasionalisme seorang anggota intelijen. Dalam profil satuan tersaji artikel tentang Eksistensi Inspektorat Jenderal Kemhan kemudian bagaimana Renhan menyusun Renstra. Selain itu kami juga telah menyajikan rubrik-rubrik lain yang akan memperkaya wawasan pengetahuan para pembaca sekalian seperti perubahan penyebutan kata cacat tubuh dan pojok Minu, serta tidak lupa

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Guna memperkaya isi majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan pastisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan maupun kritik dan saran, silahkan menghubungi tim redaksi kami melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam Jaringan Online di laman www.kemhan.go.id.

Semoga majalah WIRA edisi Mei – Juni 2015 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan segenap Tim redaksi WIRA Kemhan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H-mohon maaf lahir dan batin.

Editorial

Dear Readers,

The editorial team of WIRA's May-June 2015 edition has prepared interesting articles on defense science and state defense, quo vadis of state defense and the importance of Unity in Diversity values, and a resume of the film "*Imitation Game*", a film that reveals the merit and nationalism of an intelligent. In the profile, we present an article on the existence of the Secretariat General of the Ministry of Defense and how the Defense Plan (Renhan) makes a Strategic Plan (Renstra). In addition, we also present other articles that will broaden your insight, such as the replacement of the term "handicapped person" to "person with disability".

Dear Readers,

To enrich WIRA's content, we always hope that you will participate by sending writings, be it in the form of article, opinion, information, response, or critics and recommendation. Please contact the editorial team through our email, redaksi.wira@kemhan.go.id. WIRA magazine is also accessible online at www.kemhan.go.id.

We hope that WIRA's May-June 2015 edition will give us benefits. Happy fasting, forgive us for all the things that we may have done over the last year.

Contents

Mei-Juni 2015
Volume 54/No.38

PERTAHANAN

ILMU PERTAHANAN DAN PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

DEFENSE SCIENCE AND STATE DEFENSE EDUCATION IN BORDER AREAS DEVELOPMENT



5

QUO VADIS : PERAN PERTAHANAN NEGARA (KONSULER) UNTUK MENJAMIN MELINDUNGI KESELAMATAN WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DI LUAR NEGERI

QUO VADIS: THE ROLE OF THE STATE DEFENSE (CONSULAR) TO GUARANTEE CITIZENS' PROTECTION AND SAFETY, WHO EXPERIENCE EMERGENCIES ABROAD



15

NASIONALISME

FILM THE IMITATION GAME MENGINSPIRASI NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

FILM "THE IMITATION GAME" INSPIRES NATIONALISM OF THE INDONESIAN YOUNGER GENERATION



22

BHINNEKA TUNGGAL IKA

BHINNEKA TUNGGAL IKA (UNITY IN DIVERSITY)



27

RENCANA STRATEGIS

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2005-2025

MAKING A STRATEGIC PLAN OF MINISTRIES/INSTITUTIONS FOR 2005-2025



39

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasihat: Menteri Pertahanan/Sekjen Kemhan, Pemimpin Umum: Kapuskom Publik Kemhan, Pemimpin Redaksi: Kolonel Inf Drs. Silvester Albert T, M.A., Redaksi: Letkol Arm Joko Riyanto, S.Sos, Letkol Sus Trisatya W, M.IT., Mutiara Silaen, S.Ikom., Desain Grafis: Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom., Eko Prasetyo, S.Kom., Imam Rosyadi, Fotografi: Bid. BRA, Percetakan & Sirkulasi: Nadia Maretti, S.Kom, M.M., Diterbitkan Oleh: Puskom Publik Kemhan, Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

OLAH RAGA & KESЕHATAN

PEMANFAATAN SARANA PERTAHANAN
UNTUK PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL

TAKING ADVANTAGE OF DEFENSE FACILITIES
TO INCREASE NATIONAL SPORTS PERFORMANCE



48

KENAPA ISTILAH "PENYANDANG CACAT" DIGANTI
MENJADI "PENYANDANG DISABILITAS"?

WHY IS THE TERM "HANDICAPPED PERSON" REPLACED
WITH "PERSON WITH DISABILITY"?



57

PROFIL SATKER

PROFIL INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTAHANAN

65



WARTA KEMHAN

ADMINISTRASI UMUM

72

BERITA FOTO

77

ILMU PERTAHANAN DAN PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

DEFENSE SCIENCE AND STATE DEFENSE EDUCATION IN BORDER AREAS DEVELOPMENT

Ditulis Oleh
 Kolonel Czi Dr. Nugraha Gumilar
 Kaprodi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan



PENDAHULUAN

Lahirnya suatu ilmu harus melalui pentahapan dalam kaidah filsafat ilmu yaitu ontology (pengalaman tentang fenomena) dan kemudian melahirkan epistemologi, serta kesepakatan dari para ahlinya sehingga fenomena yang memiliki hukum/dalil/teori yang berlaku umum (obyektif, rasional, teori, metode, bersifat universal) dan didukung oleh pengetahuan - pengetahuan lain yang memperkuat sehingga menjadi bangunan suatu ilmu tersendiri, serta dari aspek aksiologi mempunyai asas manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian

INTRODUCTION

The birth of science must go through a phase in the rule of science philosophy, that is ontology (experiences in phenomenon), which will then give birth to epistemology. It must also go through an agreement from the experts so that the phenomenon which has general (objective, rational, theoretical, methodical and universal) law/theory, which prevails generally and is supported by other strengthening knowledge so that it becomes a separate science and in terms of axiology, has benefits for the human life. The same goes to "defense" which develops from knowledge to

pula dengan "pertahanan" yang mulai berkembang dari strata knowledge untuk meningkat menjadi "ilmu" atau science sebagai jawaban terhadap perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional dan global yang begitu cepat. Pada awalnya ketika berbicara "pertahanan" sama halnya dengan berbicara tentang tugas dan tanggung jawab angkatan bersenjata (TNI), namun akibat perkembangan lingkungan strategis tersebut yang menimbulkan ancaman tidak hanya bersifat militer tetapi juga non-militer dan sampai saat ini terus berkembang dengan cepat telah menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan yang mendorong lahirnya pertahanan menjadi suatu ke-ilmuan yang perlu dipelajari oleh stakeholder diluar TNI.

Dalam kajian hubungan antar bangsa, negara dianalogikan sebagai sebuah organisasi yang dapat tumbuh berkembang atau justru malah mati. Untuk dapat tetap hidup (survive), maka negara harus bisa melakukan upaya mempertahankan diri (defense) dengan mengatasi setiap kesulitan seperti ancaman terhadap eksistensinya, hambatan dalam pemenuhan kebutuhan, tantangan dalam penyelesaian masalah dan gangguan yang datang dari beberapa sektor.

Ilmu pertahanan sebagai disiplin ilmu mengkaji tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan keamanan dalam skala nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan Negara. Kebutuhan untuk mempelajari masalah-masalah pertahanan secara filosofis berangkat dari keberadaan suatu entitas yang disebut Negara (state), dan kebutuhan untuk mempertahankan diri (survive) dari ancaman-ancaman (threats) terhadap Negara.

Obyek dari ilmu pertahanan adalah perilaku Negara (state behavior) dalam menghadapi ancaman, jika ancamannya militer maka behavior-nya akan dihadapi dengan cara militer, namun bila

science as an answer to development of such rapid strategic environmental development, national, regional, as well as global. At the beginning, when we talk about "defense", it is equivalent to talk about the duties and responsibilities of the armed forces. However, due to the strategic environmental development, which gives rise to both military as well as non-military threats, it rapidly develops and has become a phenomenon that we must not ignore, and gives birth to defense as science that stakeholders outside the Indonesian Armed Forces need to study.

In the study on nation relations, a state and an organization can be modeled as analogy which can develop or on the contrary, die. To survive, a country must make efforts for self defense to overcome every difficulty, such as threats to its existence, obstacles to fulfill its needs, challenges in solving problems, and disturbances from some sectors.

The defense science as a discipline studies all aspects related to security in a national scale that is attached to the purpose of the state. The need to study defense problems philosophically starts from the existence of an entity called State, and the need to survive from threats to the State.

The object of the defense science is the State behavior in facing threats. Military threats will be faced with military methods, on the contrary, non-military threats will be faced with non-military methods. Non-military threats have very vast and various dimensions, one of which is the threat to the borders, including drugs dealing, log smuggling, human trafficking, illegal trespassing, terrorism, illegal fishing, and foreign ideology penetration. These problems must be faced with correct and right non-military methods through development of the border areas by the Indonesian Armed Forces and stakeholders in a synergic and integrated way to maintain the State's stability and sovereignty.

ancamannya nirlimiliter maka behaviornya akan dihadapi dengan cara non-militir. Dimensi ancaman non-militir sangat luas dan beragam, salah satunya ancaman di wilayah perbatasan yang seringkali terjadi dalam bentuk perdagangan obat terlarang, penyelundupan kayu, perdagangan manusia, pelintas batas illegal, terorisme, pencurian ikan serta penetrasi ideologi asing. Permasalahan tersebut perlu ditangani dengan behavior nirlimiliter secara tepat dan benar melalui pembangunan wilayah perbatasan oleh TNI dan stakeholder secara sinergis dan terintegrasi sehingga dapat menjaga stabilitas dan kedaulatan Negara.

ILMU PERTAHANAN DAN SISTIM PERTAHANAN NEGARA.

Di era perang dingin (Cold War) dan sesudahnya, pendekatan keamanan dari sisi ilmu militer (Militer Science) dirasakan kurang dapat menyelesaikan segenap potensi ancaman yang timbul. Bagi setiap

DEFENSE SCIENCE AND THE STATE DEFENSE SYSTEM

During the Cold War and thereafter, a security approach from the military science could not sufficiently solve all threat potentials. For every state, in particular Indonesia, the presence of non-state actors in non-regular militaries network has made a spectrum of increasingly complex threats. National security is no longer just a condition where threats can be solved but a condition where we can defend ourselves in national, regional as well as global scales.

In such a condition, a modern defense system must be built to prevent any form of security threats during war or peace. Defense must be assessed or studied as knowledge so that it is not considered taboo or just the duties of the armed forces. The defense science as a discipline must develop broadly supported by assessment in various disciplines.



Sumber : //tniad.mil.idm/

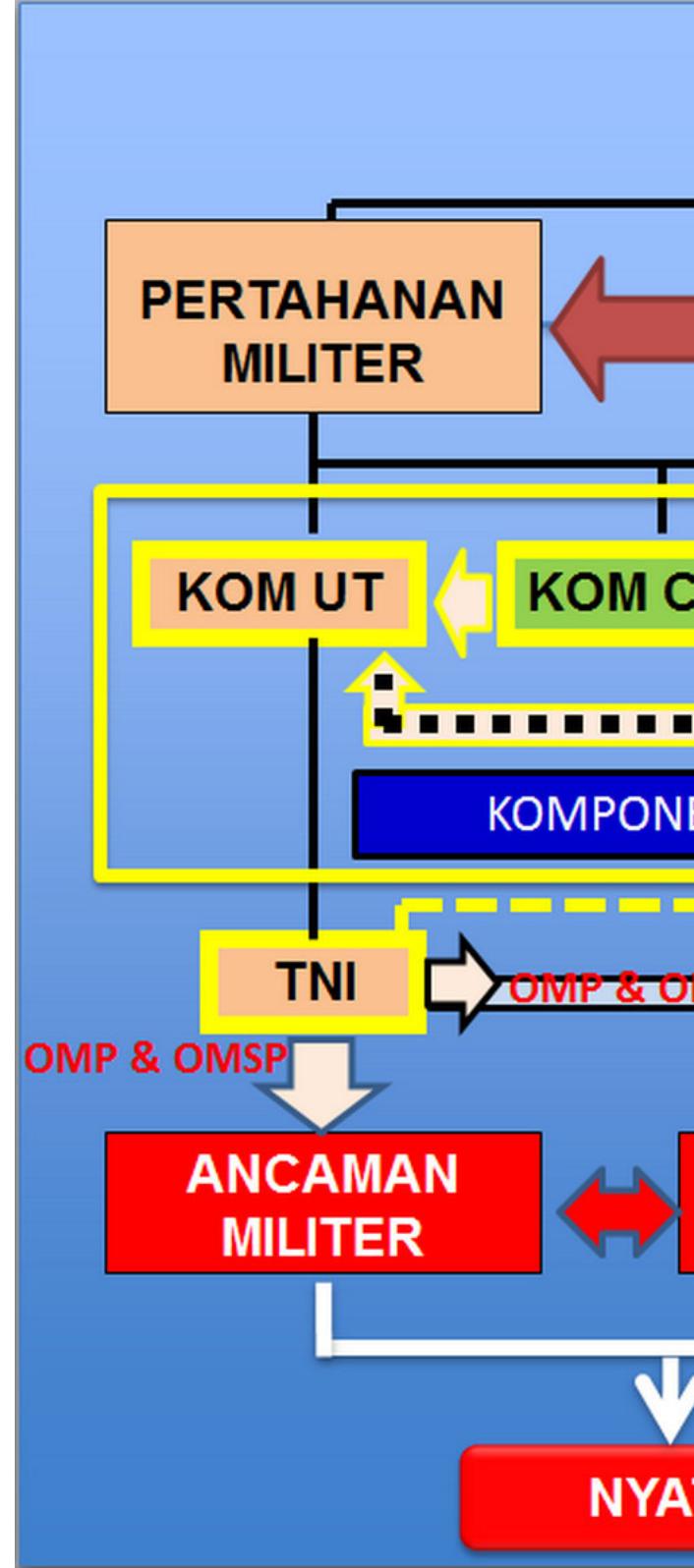
PERTAHANAN

Negara khususnya Indonesia, hadirnya non state actor dalam bentuk kelompok (network) non regular militaries menjadikan spektrum ancaman semakin kompleks. Keamanan nasional bukan lagi sekedar kondisi dimana ancaman dapat diatasi tetapi juga harus mampu bertahan dalam skala nasional regional bahkan global.

Dalam kondisi demikian perlu dibangun sebuah defense system yang modern guna menangkal segala bentuk spectrum ancaman keamanan di saat perang ataupun kondisi damai. Pertahanan harus dapat dikaji atau dipelajari (sebagai ilmu pengetahuan) agar tidak dianggap tabu dan sebagai perkerjaan tentara saja. Defence science sebagai sebuah disiplin ilmu harus berkembang luas dengan didukung kajian dari berbagai multi disiplin ilmu.

Ilmu pertahanan bersifat universal karena menjadi suatu kebutuhan tidak hanya untuk kalangan militer namun juga untuk kalangan sipil, karena ancaman yang ditimbulkan telah memasuki seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat mengancam kedaulatan negara dan bila ditinjau dari prespektif pertahanan negara dan sistem pertahanan negara (Sishaneg) sesuai dengan UU RI No 3 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) dan (2) tentang pertahanan negara menyebutkan :

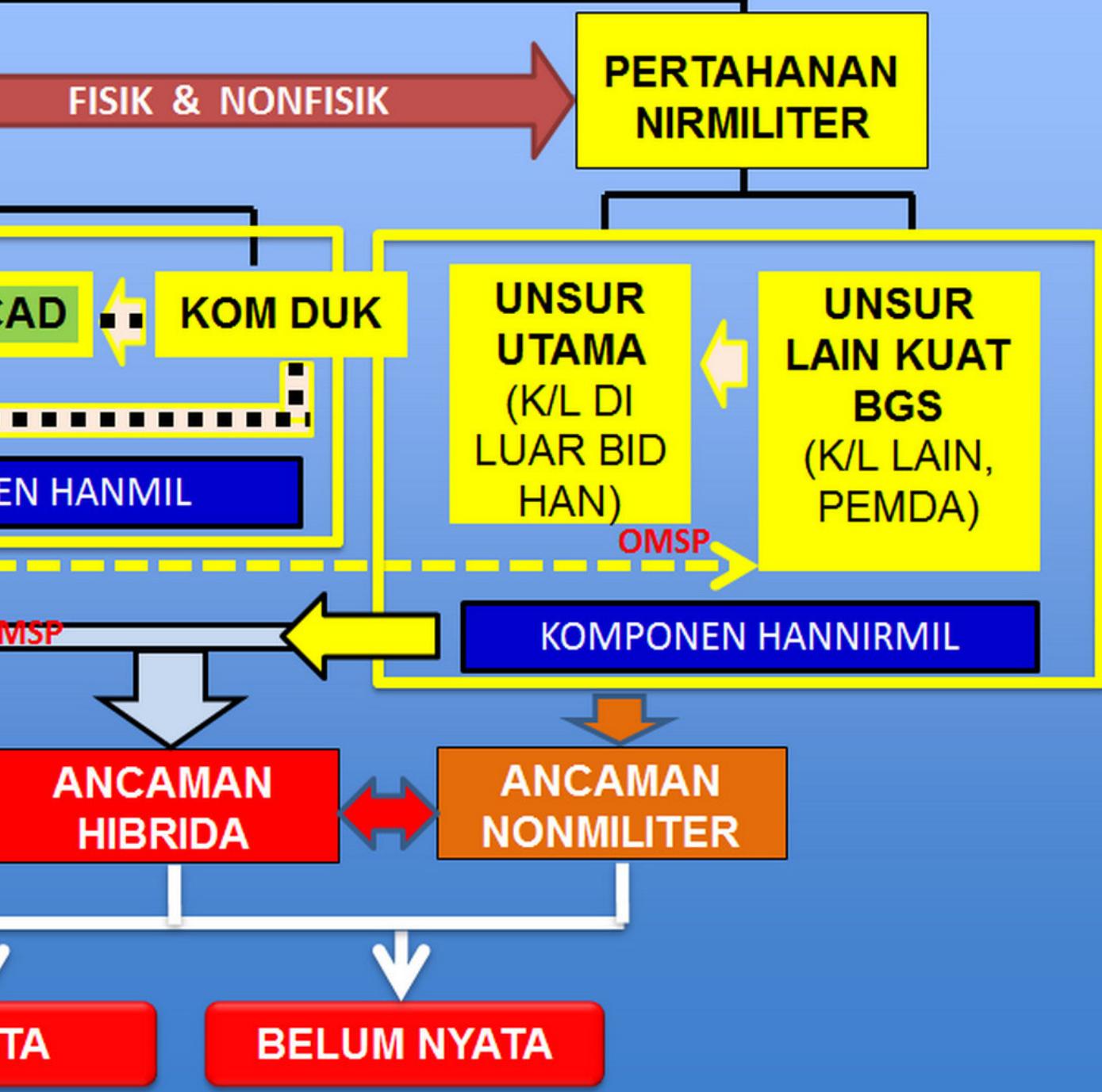
- (1) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk



Defense science is universal as it is a need not only for the military but also for the civilians. Threats have entered all dimensions of the life of the state and the nation so that they can threaten the state sovereignty. Seen from the state defense and the state defense system perspectives, Law No. 3/2002 Article 1 paragraphs (1) and (2) on the State Defense says:

- (1) State defense is all efforts to defend the state sovereignty, the integrity of

SISHANNEG

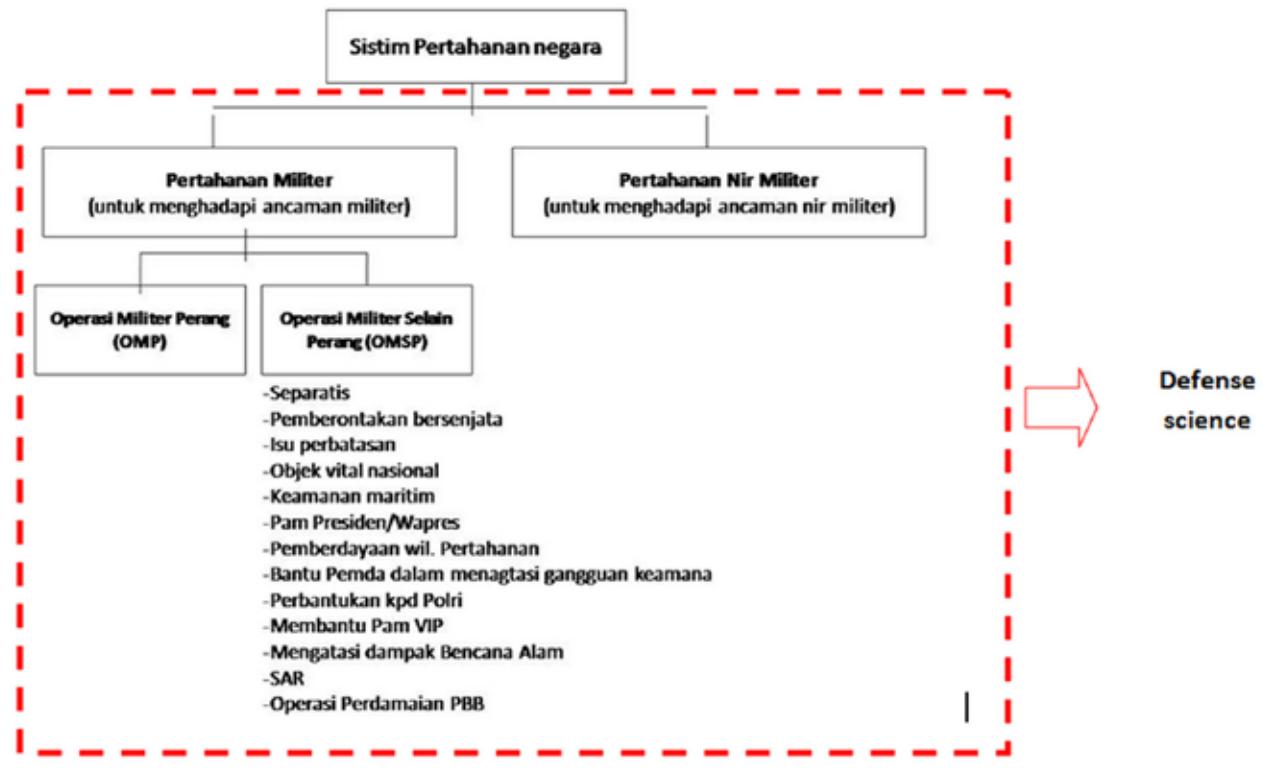


menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Dengan demikian untuk menjaga bangsa ini menjadi tanggung jawab bersama dimana seluruh komponen bangsa terlibat didalamnya. Ditinjau dari aksiologi mempelajari ilmu pertahanan akan memiliki manfaat bagi stakeholder dalam menjaga kedaulatan bangsa sesuai keahlian di bidang masing-masing.

the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the safety of the whole nation from all threats and disturbances to the integrity of the nation and the state.

(2) The state defense system is a universal state system that involves all citizens, regions, and other national resources, prepared early by the government and organized in a total, integrated, directed, and sustainable way to



Indonesia harus membangun sebuah defense system yang modern menyangkut keseluruhan pertahanan (*total defense*) baik itu menghadapi ancaman militer maupun nir militer. Melalui keilmuan yang terbina secara baik diharapkan akan menghasilkan para pakar di bidang pertahanan yang handal. Dimensi Ilmu pertahanan dalam sistem pertahanan Negara dapat dilihat pada bagan (gb.1).

Ilmu pertahanan mencakup pertahanan militer dalam rangka menghadapi ancaman militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi ancaman non-militer. Bila dikaitkan dengan judul diatas mengenai pembangunan wilayah perbatasan maka terkait erat dengan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dimana salah satu tugasnya menangani isu-isu perbatasan.

Pembangunan wilayah perbatasan dalam prakteknya TNI menyiapkan pasukan beserta alat utama sistem persenjataannya (Alutsista) sedangkan sarana dan prasarana yang perlu dibangun diwilayah perbatasan menjadi

uphold the state sovereignty, the regions integrity, and the safety of the whole nation from all threats.

Defending the nation is thus our mutual responsibility where all components of the nation are involved. Seen from axiology, studying the defense science will be beneficial for the stakeholders to maintain the nation sovereignty according to their respective expertise. Indonesia must build a modern defense system that involves total defense to face military and non-military threats. Well-developed science is expected to produce reliable experts in defense. The dimension of defense science in the State defense system can be seen in the following chart (gb. 1).

The defense science includes military defense in the frame of facing military threats and non-military defense in the frame of non-military threats. Related to the above title on the border areas development, it is closely related to the duties of Military Operations other than War (OMSP) in which one of the duties is to handle border issues.

tanggung jawab Kementerian/Lembaga non Kementerian/ pemerintah daerah yang terkait.

Pembangunan wilayah perbatasan tentunya harus berorientasi kepada kebutuhan pertahanan untuk menjaga kedaulatan baik itu kedaulatan wilayah, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta dapat mendukung tugas TNI di perbatasan. Kontribusi ilmu pertahanan dalam pembangunan wilayah perbatasan dengan mengkaji perilaku (*behavior*) Negara yang tepat dalam menghadapi isu-isu perbatasan untuk mewujudkan pertahanan Negara yang kokoh agar Negara tetap eksis dan survived.

Perilaku Negara dapat diimplementasikan dalam bentuk perencanaan program pembangunan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Institusi non TNI /pemerintah diprioritaskan untuk menangkal ancaman non-militer dengan menggunakan sistem manajeman perbatasan yang baik, artinya pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara berdampingan sehingga masyarakat perbatasan tidak terbelenggu dalam kemiskinan, keterbelakangan dan keterisolasi ditambah mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik/infrastruktur serta rendahnya sumber daya manusia menjadikan ancaman nonmiliter diwilayah perbatasan semakin meningkat sehingga dapat melemahkan pertahanan Negara.

PENDIDIKAN BELA NEGARA OLEH PERGURUAN TINGGI.

Setiap negara-bangsa (*nation-state*) yang ingin tetap eksis selalu mendidik rakyatnya menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya.

In practice, in development of the border areas, the Indonesian Armed Forces prepare the troops and the main weaponry system, while the ministry/non-ministerial institutions/related regional governments are responsible of the facilities and infrastructure that need to be built.

Development of the border areas must certainly be orientated to the defense needs to maintain sovereignty whether of the regions, ideology, politics, economics, social cultures, religion, and to support duties of the Indonesian Armed Forces at the border areas. The contribution of the defense science in development of the border areas is by assessing the right State behavior in facing border issues to realize a strong state defense so that the State exists and survives.

The State behavior can be implemented in the planning of the border areas development program made by non-Indonesian Armed Forces institutions/government, prioritized to prevent non-military threats using a good border management system. It means that development is conducted through a welfare and security approach so that the people in the border areas will not remain in poverty, backwardness, and isolation as well as be trapped by expensive goods and services, limited facilities and infrastructure, public services, and low human resources that may increase non-military threats in the border areas that they weaken the state defense.

STATE DEFENSE EDUCATION BY THE HIGHER EDUCATION

To remain existent, every nation state educates its people to be smart and good citizens. The people therefore want the younger generation to be prepared to participate in the life of the people and the country.

A state will have stronger defense when the nation unites to fight for the country to protect and defend the rights in the country

PERTAHANAN

Suatu Negara akan semakin kuat pertahanannya bila saja bangsa tersebut bersatu padu untuk memperjuangkan negara dalam melindungi dan membela hak-hak yang dimiliki di dalam suatu negara itu sendiri. Dalam dasar negara Indonesia pun sudah diterangkan tentang hak-hak negara dalam melindungi dirinya. Pembinaan terhadap generasi muda menjadi warga negara yang baik perlu mendapat perhatian dan menjadi tugas yang sangat penting bagi lembaga kependidikan sehingga dapat mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik serta memiliki rasa bela negara seperti yang terkandung dalam sila Pancasila yang menjadi dasar pedoman hidup bangsa Indonesia, namun semakin berkembangnya dan semakin maraknya arus globalisasi dunia membuat lalai akan kesadaran untuk melindungi dan membela negaranya dari ancaman ancaman yang terjadi.

itself. In the Indonesian principle, the rights of the citizens to protect themselves have been explained. Development of the younger generation to become good citizens must be paid attention. It is an important duty of educational institutions to create responsible, effective and educated citizens who have a sense of state defense as mentioned in Pancasila as guidance for the Indonesian people. However, the increasingly developed globalization has made us negligent of the awareness to protect and defend the state from any threat.

One of the strategies to build the nation's deterrent power is by revitalizing development of the nation defense awareness to every citizen. The strategy will be realized upon integrity of the inter-sectoral organization, as a responsibility of the human resources development to realize the integrity and survival of the Unitary State of the Republic of Indonesia. It is hoped that there will be an understanding



Sumber : //menwastainbengkulu.blog.com/

Strategi dalam membangun daya tangkal bangsa untuk menghadapi kompleksitas ancaman salah satunya dengan melaksanakan revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara. Strategi itu akan terwujud bila ada keterpaduan penyelenggaraan secara lintas sektoral, sebagai wujud tanggung jawab bersama pembinaan SDM untuk mewujudkan keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI, diharapkan ada kesepahaman bahwa pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun karakter bangsa yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Pendidikan bela negara yang efektif apabila dipersiapkan terhadap generasi muda bangsa yang dalam proses mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Untuk itu penting diadakan kerjasama antara instansi yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pendidikan tinggi dengan Kementerian Pertahanan untuk membangun sinergi dalam spektrum bela negara mulai wujud yang paling halus (*soft power*) sampai paling keras (*hard power*), mulai hubungan baik sesama warga Negara sampai bersama-sama menangkal ancaman untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara yang merupakan tugas bersama sesuai bidang dan profesi.

Korelasi antara Bela Negara dan perguruan tinggi dimana para generasi muda menimba pendidikan dilakukan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti dharma kesatu diimplementasikan pada mata kuliah khusus "Bela Negara" dengan jam tatap muka tertentu. Dharma kedua, melalui hadirnya lembaga penelitian, pengembangan dan pengkajian khusus bela Negara. Studi pada lembaga pengkajian dilakukan dengan menetapkan topik-topik tertentu dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan pemerintah khususnya dalam membangun wilayah perbatasan. Dharma

that the state defense awareness as an effort to build the nation's characters is inseparable from the national development.

The state defense education will be effective when prepared for the younger generation in their process to obtain education in the higher education. It is therefore important to set up cooperation between institutions of which the duty is to develop with the Ministry of Defense. It is to set up synergy in the state defense spectrum, from the soft power to the hard power, from good relations amongst the citizens to jointly prevent the threats to protect the nation and the state's sovereignty. It is a mutual duty according to their field and profession.

Correlation between the state defense and the higher education where the younger generation are studying is executed through Tri Dharma perguruan Tinggi, in which the first principle is implemented in the State Defense subject with certain hours of face-to-face meeting. The second principle is executed through the presence of research, development and assessment of state defense institutions. The study at assessment institutions is conducted by determining certain topics which are taken advantage by the community and the government in particular in developing the border areas. The third principle, the people dedicate by routinely sending students to the border areas for an internship program to concretely improve the life of the border community. If this program can continuously be developed in other universities, the State defense awareness will be realized as desired in Constitution 1945. The state defense education program in higher education is an implementation of the defense science as a form of State behavior in efforts to eliminate non-military threats in the border areas. This way, development in the border areas, in particular the human resources development, will be beneficial in defending the state sovereignty.

PERTAHANAN

ketiga, pengabdian masyarakat dilakukan dengan pengiriman kegiatan kuliah kerja nyata para mahasiswa ke daerah perbatasan yang dilakukan secara rutin untuk memperbaiki kehidupan masyarakat perbatasan secara konkret. Apabila program ini terus dapat dikembangkan pada perguruan tinggi lainnya, maka kesadaran bela Negara akan terwujud seperti apa yang dicita-citakan dalam UUD 1945. Program pendidikan bela Negara di lingkungan perguruan tinggi merupakan implementasi dari ilmu pertahanan sebagai bentuk perilaku negara (State behavior) dalam upaya mengeleminir khususnya ancaman nir militer yang terjadi di wilayah perbatasan sehingga pembangunan di wilayah perbatasan khususnya pembangunan SDM nya akan memberikan manfaat dalam mempertahankan kedaulatan Negara.

KESIMPULAN

Ilmu Pertahanan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Negara yang dilakukan oleh seluruh stakeholder sesuai dengan bidang dan profesinya termasuk Perguruan Tinggi (melalui program pendidikan bela negara) dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa, seiring dengan berkembangnya ancaman (*threat*) yang datang. Demikian pula dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan dilakukan melalui pembangunan di wilayah perbatasan baik secara fisik maupun nonfisik yang bersifat soft sampai dengan hard power sebagai bentuk langkah /perilaku Negara (*state behavior*) untuk menjamin agar Negara ini tetap eksis dan survive.***

CONCLUSION

The defense science is used to solve the country's problems by all stakeholders according to their field and profession. The higher education (through the state defense education program) guarantees the nation's life in line with development of the coming threats. The border problems are solved with development in the border areas, both physical as well as non-physical, both soft power as well as hard power, as the State behavior to guarantee that the State remains existent and survives.***



Sumber : //bkdbabelprov.go.id/



Sumber : //kemenpora.go.id/

QUO VADIS :
PERAN PERTAHANAN NEGARA (KONSULER)
UNTUK MENJAMIN MELINDUNGI KESELAMATAN WARGA NEGARA
YANG MENGALAMI KEADAAN DARURAT DI LUAR NEGERI

QUO VADIS:
THE ROLE OF THE STATE DEFENSE (CONSULAR)
TO GUARANTEE CITIZENS' PROTECTION AND SAFETY,
WHO EXPERIENCE EMERGENCIES ABROAD

Ditulis Oleh
 Kolonel Dr (c) Sigit Priyono, GSC, S.IP, M.Sc

Kabid Kerma Regional ASEAN Kemenko Polhukam



Diaspora Indonesia yang terdiri dari pekerja migran (devisa sekitar 24 Trilyun tiap tahun), tenaga terampil, dan pelajar, berjumlah kurang lebih 4,3 Juta WNI yang bekerja ataupun tinggal di luar negeri terutama di Malaysia, Saudi Arabia, Belanda, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan serta negara lainnya. Jumlah tersebut merupakan terbesar diantara negara ASEAN. Posisi kedua tercatat 2,4 Juta Warga Negara Filipina yang bekerja di luar negeri. Suatu kewajiban bagi negara untuk menjamin

Indonesia's diaspora which consists of migrant workers (around IDR 24 trillion of foreign exchange per year), skilled workers, and students totals more or less 4.3 million, who work or live abroad, particularly in Malaysia, Saudi Arabia, the Netherlands, Singapore, Taiwan, Hong Kong, and South Korea as well as other countries. It's the largest number compared to other ASEAN countries. The Philippines is the second with 2.4 million citizens working abroad. It's then an obligation for the country to guarantee protection and safety of its citizens at

PERTAHANAN

perlindungan dan keselamatannya baik didalam maupun di luar negeri, sesuai diamanatkan dalam UUD 1945 dan perundangan lainnya.

Fakta kehadiran negara telah membuktikan bahwa pada bulan April 2015 Indonesia telah melakukan evakuasi terhadap 1684 WNI yang terjebak konflik diYaman dan pada pada Mei 2015 telah melakukan evakuasi terhadap 26 WNI dari Nepal akibat bencana gempa. Pada situasi krisis di Yaman, selain warga negara Indonesia terdapat pula warga negara dari anggota ASEAN. Tercatat 464 warga Filipina dan 106 warga Thailand yang terjebak konflik. Berdasarkan semangat ASEAN dan permintaan dari Menlu Filipina dan Menlu Thailand kepada Menlu RI Indonesia membantu proses evakuasi warga kedua negara tersebut. Disamping itu, negara juga telah melaksanakan evakuasi hukum bagi warga negara yang terkena proses hukum di luar negeri.

Fenomena dua hal evakuasi keadaan darurat perang dan darurat bencana di luar negeri akhir-akhir ini menjadi rebutan panggung politik nasional. Kementerian dan Lembaga, tentunya menjadikan pertanyaan bagaimanakah peran pertahanan atau peran konsuler apabila dihadapkan pada salah satu tujuan adanya negara untuk menjamin perlindungan dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman atau kedaruratan di luar negeri ? dan bagaimana Implementasi kebijakan penyelamatan dan evakuasinya ?

VARIASI BASIS PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI (KONDISI KRISIS)

Kerja sama Regional. ASEAN telah melakukan inisiatif untuk membentuk kesepakatan guna memberikan bantuan kekonsuleran bagi warga ASEAN di negara ketiga pada situasi krisis. Langkah tersebut telah diawali dengan statement oleh para Menlu ASEAN pada pertemuan ASEAN Ministers' Meeting ke 39 pada 26 Juli

home and abroad, as mandated in the Constitution 1945 and other legislations.

The state's presence was proved in April 2015 when Indonesia evacuated 1.684 Indonesians trapped in the conflict in Yemen, and in May 2015 when Indonesia evacuated 26 citizens from the earthquake in Nepal. During the critical situation in Yemen, apart from Indonesians, there were also citizens of other ASEAN countries. They included 464 people of the Philippines and 106 of Thailand who were trapped in the conflict. Based on the ASEAN spirit and upon request from the Philippine and Thai Foreign Ministers to the Indonesian Foreign Minister, the Indonesian government helped the evacuation process of both countries' citizens. In addition, the government also conducted legal evacuation for citizens in a legal process abroad.

The phenomenon of both evacuations in the war and disaster emergencies abroad has lately been a discussion in the national politics. The question will certainly be how the defense and consular roles are when the ministries or institutions are facing a situation where one of the country's purposes is to guarantee the protection and safety of the whole nation from any threat and emergency abroad? And, how is the implementation of the rescue and evacuation policy?

VARIATION OF SERVICE AND PROTECTION BASIS OF INDONESIAN CITIZENS ABROAD (CRITICAL CONDITION)

Regional Cooperation. ASEAN has initiated to set up an agreement to provide consular assistance for ASEAN citizens in a third country in a crisis situation. It began with a statement by ASEAN Foreign Ministers at the 39th ASEAN Ministerial Meeting on July 26th, 2006. It was then followed up with the adoption of the Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to Nationals of ASEAN Member States in a Crisis Situation at the 40th ASEAN Ministerial Meeting

2006 yang kemudian ditindaklanjuti dengan adopsi penyusunan Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to Nationals of ASEAN Member States in Crisis Situation pada pertemuan AMM ke 40, Juli 2007. Akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat

beberapa kendala terutama faktor pendanaan, penyediaan travel document, serta masalah keterbatasan kapasitas evakuasi masing-masing negara ASEAN.

Kebijakan Nasional. Kabinet Kerja Presiden Jokowi, "Tri Sakti" yang merupakan kebijakan pembangunan Kabinet kerja, diarahkan untuk berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam Budaya. Kabinet kerja berorientasi pada "Nawa Cita" yang intinya bertekad untuk kembali menghadirkan negara dalam melindungi warga negara, meningkatkan kualitas hidup bangsa dengan kemandirian ekonomi dan membangun karakter bangsa yang berlandaskan ke Bhinekaan. Implementasinya tentu pada level Kementerian dan Lembaga akan menderivatif kebijakan nasional sesuai dengan peran K/L tersebut.

Diplomasi Kementerian Luar negeri. Paradigma baru dengan dan telah menampilkan profil diplomasi yang membumi (Down to earth diplomacy), yakni diplomasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, bermanfaat dan terkoneksi dengan kebutuhan rakyat (Diplomacy for the people). Dalam pelaksanaannya terutama mengutamakan kepentingan rakyat dan menegaskan kehadiran negara,



Sumber : //okebung.com/

in July 2007. However, there remained some constraints in the implementation, especially the funding, travel documents, and the limited capacity of evacuation of ASEAN respective countries.

National Policy. President Jokowi's Kabinet Kerja, "Tri Sakti", is directed to be sovereign in politics, to be independent in the economy, and to have characteristics in culture. The cabinet is oriented to "Nawa Cita" which is determined to represent the state to protect the people, to increase the nation's quality of life with economic independence, and to build the nation's characters based on unity in diversity. At the ministerial and institutional level, the implementation will derive from the national policies according to the roles of the ministries/institutions.

Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs. The new paradigm presents a down to earth diplomacy, which prioritizes the people's interest, advantageous and connected to the people's needs (diplomacy for the people). In the implementation, it prioritizes the people's interest and confirms the state's presence. Indonesia's diplomacy is conducted in a firm and dignified way through three priorities: first, sovereignty; second, economic diplomacy; and third, protection of the Indonesian citizens abroad. The realization can be felt nationally by asking

Diplomasi Indonesia dilakukan dengan tegas dan bermartabat melalui tiga prioritas; pertama, Kedaulatan; kedua, Diplomasi ekonomi (perwakilan RI di luar negeri menjadi window Marketing); dan ketiga, Perlindungan warga negara RI di luar negeri. Realisasinya telah dirasakan secara nasional dengan mengajak TNI AU dan BNPB memberikan bantuan internasional dan mengevakuasi WNI melalui pesawat TNI AU.

Konsuler. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan pelayanan yang diberikan oleh negara kepada warganya di luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri mempunyai kewajiban memberikan pelayanan konsuler dan memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan membantu menangani permasalahan konsuler baik dalam situasi biasa maupun darurat. Konsulat Jenderal Indonesia juga memberikan pelayanan untuk melegalisasi dokumen, seperti; Paspor dan Visa. Secara efektif bisa bekerja dalam keadaan normal, akan tetapi apabila negara tersebut dalam keadaan darurat tentunya prioritas pertama keselamatan jiwa WNI, selanjutnya memproses administrasi dokumennya.

Diplomasi Pertahanan. Secara formal implementasi di luar negeri dilaksanakan oleh Atase Pertahanan (Athan) dan Atase Militer. Secara informal, oleh para pejabat dan para personel Kemhan dan TNI yang melaksanakan tugas di luar negeri. Hakekat dan tujuan diplomasi pertahanan merupakan (1) kehadiran atau perwakilan (*representation*); (2) Mempunyai efek/daya tangkal (*deterrent effect*) dengan memberikan penerangan tentang apa yang negara kerjakan (*transforming the way we work*); (3) Melakukan negosiasi dan posisi tawar (*negosiation and bargaining position*); (4) Meningkatkan kemampuan (*increasing capability*); (5) Meningkatkan kredibilitas (*increasing credibility*); (6) Menurunkan keinginan negara yang berseberangan kepentingan untuk melakukan hal-

the Indonesian Air Force and the National Agency of Disasters Prevention (BNPB) to provide international assistance and evacuate Indonesian citizens with the Indonesian Air Force's aircrafts.

Consular. It's the terminology used to show services provided by the state to its citizens abroad. A Consulate General of the Republic of Indonesia abroad has the obligation to provide consular services and assistance to Indonesian citizens abroad and to help handle consular problems in both an ordinary situation as well as emergencies. The Indonesian Consulate General also provides services to legalize documents, such as passport and visa. It can work effectively in a normal situation. However, in emergencies, the first priority will be the safety of the Indonesian citizens, then to process the documents administration.

Defense Diplomacy. Formally, the diplomacy abroad is implemented by the Defense Attaché and the Military Attaché. Informally, it's implemented by officials and personnel of the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces on duties abroad. The substance and goals of the defense diplomacy include (1) representation; (2) deterrent effect by explaining what the state works; (3) negotiation and bargaining position; (4) increasing capability; (6) decreasing the opponents' stakes; (7) information gathering or intelligence; (8) promoting international law; (9) confidence building measures or trust building. To date, a Defense Attaché tends to provide personal assistance for a high official than to implement the functions and goals mentioned above so that there should be a transformation of duties attached to the consular functions; in particular, to provide assistance in an emergency situation, both disasters as well as conflicts, so that it can provide inputs to the Ministry of Defense to grab the national politics. The defense function has the obligation to protect the citizens at home and abroad.

hal yang tidak diinginkan (*decreasing opponent's stakes*); (7) Pengumpulan data intelijen atau informasi dan laporan (*information gathering or intelligence*); Membentuk opini publik (*public opinion*); (8) Mempromosikan hukum internasional (*to promote international law*); (9) membangun saling percaya (*confidence building measures*) atau *trust building*. Selama ini fungsi Atase pertahanan cenderung pada pelayanan pribadi pejabat dari pada fungsi dan tujuan tersebut diatas sehingga perlu adanya transformasi tugas yang melekat pada fungsi konsuler khususnya memberikan bantuan terhadap situasi darurat baik bencana maupun konflik kekerasan, sehingga akan dapat memberikan input terhadap Kemhan dalam merebut panggung politik Nasional. Sudah menjadi kewajiban bahwa fungsi pertahanan melindungi warga negara baik didalam maupun di luar negeri.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi Kerja Sama Regional. Pada KTT ASEAN ke-26 April 2015 di Malaysia, Presiden Jokowi, melalui statement pada sesi Pleno KTT, disampaikan perlunya mendorong penyusunan guidelines untuk memberikan bantuan kekonsuleran bagi warga ASEAN di negara ketiga saat krisis. Hal ini ditegaskan kembali melalui keputusan rapat Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia untuk menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh mekanisme ASEAN melalui AMMTC (ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime) melalui forum Ad Hoc Working Group DGICM (ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs) untuk merumuskan "Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to Nationals of ASEAN Member States in Crisis Situation".

Formula guidelines untuk memberikan bantuan kekonsuleran bagi warga

POLICY IMPLEMENTATION

Implementation of Regional Cooperation. During the 26th ASEAN Summit in April 2015 in Malaysia, President Jokowi, in a statement delivered at the summit's plenary session, emphasized the importance of guidelines to provide consular assistance for ASEAN citizens in a third country in crisis. This was confirmed through a meeting decision of the ASEAN-Indonesia National Secretariat to follow up the President's instruction. This was followed up by ASEAN mechanism through ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), through an Ad-Hoc Working Group forum of ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs (DGICM) to formulate the Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to Nationals of ASEAN Member States in Crisis Situation.

The guidelines to provide consular assistance for ASEAN citizens in a third country in a crisis situation are mentioned in the draft of ASEAN Political Security Community Attendant Document (APSC-AD) point A.1.4.vi, which will be ASEAN's blueprint in politics and security for the period of 2015-2025. In this case, the Ministry of Defense will be able to support the consular role in emergencies through the mechanism of ADMM and ADMM Plus.

National Implementation. Preamble of Constitution 1945 mandates the state to protect the whole nation. According to the national mechanism, when a citizen experiences a threat due to an emergency situation caused by a disaster or a conflict abroad, the Ministry of Foreign Affairs provides an input to the National Security Council (DKN) to hold a meeting to produce a national decision through DKN (in this case, the President is also Head of DKN). Under the decision, the government deploys national resources to safe its citizens abroad. If the evacuation

PERTAHANAN

negara ASEAN di negara ketiga pada situasi krisis telah dicantumkan pada draft ASEAN Political Security Community Attendant Document (APSC-AD) point A.1.4.vi yang nantinya akan menjadi semacam blueprint ASEAN pada pilar Polkam untuk periode 2015-2025. Dalam hal ini tentu nantinya Kemhan dapat mengusung peran konsuler dalam keadaan darurat melalui mekanisme ADMM dan ADMM Plus.

Implementasi Nasional. Amanat Pembukaan UUD 1945, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sesuai mekanisme nasional apabila warga negara mengalami ancaman jiwa akibat dari situasi darurat yang diakibatkan bencana atau konflik kekerasan di luar negeri, Kementerian Luar Negeri memberikan input ke Dewan Keamanan Nasional (DKN), untuk diadakan sidang dengan tujuan menghasilkan keputusan nasional. Melalui DKN (Kepala pemerintahan dalam hal ini Presiden juga Ketua DKN) memutuskan penggerahan sumber daya nasional guna penyelamatan warga negaranya di luar negeri. Apabila evakuasi di luar negeri bernuansa konflik kekerasan tentunya Kemhan mengeluarkan kebijakan penggerahan TNI untuk melaksanakan operasi militer guna penyelamatan warga negara di luar negeri.

Transformasi Peran Diplomasi Pertahanan. Dalam situasi konflik di suatu negara, Athan sebagai pelaksana diplomasi pertahanan semestinya berperan aktif dengan mekanisme sharing of intelligence information sebelum terjadinya situasi krisis misalnya kudeta, konflik sosial bersenjata, invasi negara lain, ataupun kerusuhan. Apabila Indonesia menerima informasi intelijen yang akurat dari negara lain, Indonesia akan dapat melakukan langkah antisipasi, sehingga dalam situasi kedaruratan pentingnya meningkatkan fase penguatan konsuler antara sipil dan militer dalam kerangka civil-military coordination, civil-military cooperation dan berlanjut pada civil



abroad is conflicting, the Ministry of Defense will certainly issue a policy to deploy the Indonesian Armed Forces personnel to conduct a military operation to save the citizens abroad.

Transformation of the Defense Diplomacy Role. In a conflicting situation in a country, the Defense Attaché as executor of the defense diplomacy should play an active role in the mechanism of sharing intelligence information prior to the crisis situation, such as coup d'etat, armed social conflict, invasion by another country, or riot. When Indonesia receives accurate intelligent information from another country, it can make anticipative steps to strengthen the consular role between the civilian and the military in the frame of civil-military coordination, followed up by civil-military cooperation, and civil-military operation to protect Indonesian citizens abroad.

Recommendations

1. The Coordinating Ministry of Politics Justice and Security as coordinator of the Justice and Security overseeing AMMTC mechanism, encourages the Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to Nationals of ASEAN Member States in Crisis Situation through an undergoing process, the Ad Hoc Working Group DGICM.

military operation untuk memberikan perlindungan WNI di Luar negeri.

Rekomendasi

1. Kemenko Polhukam selaku koordinator pilar Polkam yang membawahi mekanisme AMMTC mendorong penyusunan *Guidelines for the Provision of Emergency Assistance by ASEAN Missions in Third Countries to Nationals of ASEAN Member States in Crisis Situation* melalui proses yang telah berlangsung yaitu Ad Hoc Working Group DGICM.
2. Guna menindaklanjuti instruksi Presiden dan permintaan Setnas ASEAN Indonesia untuk melakukan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait dalam mendukung posisi Indonesia dan mengakselerasi penyusunan guidelines maka dipandang baik apabila dapat dilaksanakan pertemuan dengan seluruh stakeholders nasional.
3. Pemerintah dalam hal ini Kemhan memiliki peran utama merevitalisasi dan menkonstruksi terwujudnya Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui RUU Kamnas (proses perumusan oleh Kemhan), yang selama ini ancaman publik/lingkungan dan ancaman insani di dalam dan diluar negeri bersifat aktual dan sangat mendesak untuk segera diformulasikan penanganan secara tepat. Disamping itu kebijakan integrasi Kemhan dan Kemlu secara linier dalam antisipasi menghadapi kedaruratan baik didalam dan di luar negeri.
4. Revolusi paradigma diplomasi pertahanan (Athan) untuk berorientasi fokus pada tugas pokok diplomat pertahanan, Intelijen, perwakilan Kemhan di luar negeri (instansi vertikal), dan fungsi konsuler pada saat terjadi situasi darurat di negara yang menjadi bagian tugasnya, bekerja sama dengan konsuler dari Kemenlu dan unsur pertahanan di negara tersebut.***



Sumber : //jakartagreater.com/

FILM THE IMITATION GAME MENGINSPIRASI NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

FILM “THE IMITATION GAME” INSPIRES NATIONALISM OF THE INDONESIAN YOUNGER GENERATION

Ditulis Oleh

Mayjen TNI Hartind Asrin

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan
Head of Education and Training Agency of the Ministry of Defense

Film ini diangkat dari buku biografi “Alan Turing: The Enigma” karya Andrew Hodges yang membongkar rahasia negara selama hampir 50 tahun. Keberhasilan seorang pemuda dalam membantu Badan Intelijen Inggris MI-6 membongkar kunci sandi Nazi pada Perang Dunia II terpaksa dipendam karena pertimbangan penegakan norma sosial.

Perang Dunia II, antara tahun 1939–1945, Jerman sangat berkuasa di Eropa dengan sekutu terdekatnya Italia. Hampir seluruh Eropa dikuasainya. Manuver pasukan Nazi dapat dihentikan Pasukan Gabungan Inggris dan Amerika Serikat. Tidak banyak orang yang tahu bahwa kemenangan itu, berasal dari intelijen MI-6. Mesin sandi Christopher yang ditemukan Alan Turing mensupply Intelijen jitu tentang rencana pergerakan pasukan Nazi.

The film was taken from the biography book “Alan Turing: The Enigma” written by Andrew Hodges, who had revealed the country’s top-secret for almost 50 years. The success of a young man in assisting the British Intelligence Agency MI-6 in deciphering Nazi’s code in World War II was forced to be buried for social norms considerations.

During World War II, between 1939–1945, Germany had the power all over Europe with its closest ally, Italy. The country dominated almost the entire Europe. Nazi’s maneuvers could be stopped by the British and United States joint troops. Not many people know that the victory began from MI-6 intelligence. Christopher’s code machine that Alan Turing had invented, supplied the intelligence with Nazi’s movement plan. The anticipation was to



Sumber : //youtube.com/

DAL 1 GENNAIO AL CINEMA



Antisipasi dengan menerapkan strategi pengelabuan, dengan penggerahan kekuatan besar-besaran di Barat. Memobilisasi kekuatan palsu berupa pesawat perang palsu, tank palsu, kapal selam palsu, ribuan pasukan palsu dengan menabur logam-logam ke udara untuk mengecoh radar Nazi. Kekuatan Nazi terpecah untuk melakukan penyergapan besar-besaran ke Barat dan Pasukan Sekutu memukul kekuatan Nazi di Timur. Kita kenal dengan kemenangan Sekutu di pantai Normandia.

NASIONALISME PEMUDA

Pada masa itu, para pemuda Inggris banyak yang terlibat dalam Perang Dunia II. Mereka bergabung menjadi anggota Angkatan Bersenjata. Pemuda-pemuda yang tidak terlibat langsung di-front depan mendaftarkan diri untuk membantu sesuai keahliannya masing-masing. Badan Intelijen Inggris, MI-6, berusaha keras untuk membongkar kode mesin Enigma Nazi yang berhasil didapat dari agennya di Polandia. Upaya perekutan dilakukan

apply a deception strategy by deploying a massive power in the West, to mobilize an artificial power of artificial warplanes, artificial tanks, artificial submarines, artificial troops of thousand soldiers who sowed metal to the air to deceive Nazi's radar. Nazi's power was divided to conduct a massive ambush to the West and the Allies troops hit Nazi's force in the East. We know it as the Allies' victory in Normandy.

NATIONALISM OF THE YOUTH

At that time, many of the British young people were involved in World War II. They joined the Armed Forces. Those not directly involved at the front line, registered themselves to assist according to their respective skill. The British Intelligence Agency MI-6 tried hard to decipher Nazi's Enigma machine code that they successfully obtained from their agent in Poland. The recruitment was made to select young people who had the expertise to solve puzzles and mathematicians. Alan Turing, as a mathematician, registered himself to join the British Armed Forces

NASIONALISME

dengan menjaring pemuda-pemuda yang jago dalam memecahkan teka-teki silang dan ahli matematika. Alan Turing sebagai seorang ahli matematika melamar untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Inggris melalui MI-6.

Anak muda yang tergabung dalam Tim Alan Turing sebanyak 8 orang, bekerja keras untuk memecahkan kunci sandi Enigma. Mereka hampir putus asa dan berulang kali mendapat tegoran dari Komandan MI-6, Mayjen Stewart Menzies. Mereka sudah banyak menghabiskan dana dan belum menunjukkan hasil. Alan bersemangat karena mesin yang sedang dirancang diberi nama mantan kekasihnya. Gairahnya meningkat untuk segera menemukan mesin pembongkar sandi Nazi yang sedang ditekuninya bersama Tim. Pada akhirnya Alan Turing bersama Tim berhasil dan mesin Christopher menjadi tonggak sejarah kemenangan Inggris. Kemenangan dengan tidak mengerahkan kekuatan yang besar dan meminimalisir korban.

NAWACITA

Pemerintah Jokowi dengan filosofi

through MI-6.

There were 8 young men who joined in Alan Turing's team, who worked hard to solve Enigma's code. They almost gave up and were repeatedly reproved by MI-6 Commander, Major General Stewart Menzies. They had spent a lot of money and yet did not get any result. Alan remained enthusiastic as the machine being designed, was named after his former lover. His passion arose to soon invent Nazi's code cracking machine that he was studying with Tim. Eventually, Alan Turing and Tim made it and Christopher machine became a milestone of the British victory. The victory was achieved not by deploying great power, instead by minimizing the number of victims.

NAWACITA

In Jokowi's administration with Nawacita philosophy, one of his priority programs is "mental revolution". Why has this become a priority? At present, our nation is experiencing a moral crisis, corruption reigns, the youth is involved in drugs, students fight with each other, free sex, and the nation's characters





Nawacita, salah satu program prioritasnya adalah "revolusi mental". Kenapa hal ini menjadi program prioritas? Saat ini bangsa kita sedang mengalami krisis moral, korupsi merajalela, pemuda terlibat narkoba, perkelahian antar pelajar dan seks bebas dan banyak karakter bangsa meluntur dan mengalami degradasi. Hal ini sebagai dampak dari budaya postmodern yang masuk dengan bebas melalui Teknologi Informasi Komunikasi yang semakin canggih. Dunia tanpa batas, "global village". Hegemoni budaya postmodern merambah ke seluruh penjuru dunia tanpa bisa difilter secara maksimal. Penemuan mesin sandi Alan Turing sebagai awal perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi, yang sekarang kita kenal bernama Komputer. Teknologi berkembang terus dengan pesat dari masa ke masa. Saat ini, kita kenal dengan era multimedia.

Generasi kita saat ini sangat akrab dengan teknologi TIK. Generasi Milenia Indonesia, sebagai bonus demografi yang merupakan 50% populasi Indonesia

are degrading. It is an impact of the post modern culture that freely enters through the increasingly sophisticated Information and Communication Technology. The world has become borderless, a "global village". The post modern cultural hegemony has reached the world around without having been filtered maximally. The invention of Alan Turing's code machine was a beginning of the development of Information and Communication Technology that we now know as computer. Technology continues to develop rapidly from time to time. At present, we know the multimedia era.

Our generation has become quite familiar with the Information and Communication Technology. Indonesia's millennia generation is a demographic bonus where we currently have 50% of the Indonesian population, which is the fourth largest population in the world, under 30 years (Swa Edisi 10, XXXI, page 20) and familiar with the latest technology. We hope that the film "The Imitation Game", being a box office in 2014-2015, would

NASIONALISME

berusia dibawah 30 tahun dan menempati posisi ke-empat terbesar di dunia (Swa Edisi 10, XXXI, hal 20).

Jangan dilupakan, moral generasi muda rentan terhadap pengaruh budaya postmodern yang disebarluaskan melalui media. Diharapkan Film *The Imitation Game* yang Box Office pada tahun 2014-2015 di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia dapat menginspirasi patriotisme dan nasionalisme generasi muda yang nasionalismenya mulai meluntur akhir-akhir ini. Semoga generasi muda segera bangkit dan menjadikan Indonesia makmur dan sejahtera dimasa mendatang.***

inspire patriotism and nationalism to our younger generation whose nationalism is fading. Let us hope that we will soon rise up and make Indonesia a prosperous country in the future.***



BHINNEKA TUNGGAL IKA

BHINNEKA TUNGGAL IKA (UNITY IN DIVERSITY)

Ditulis Oleh
 Letkol Czi Safril Hidayat, psc, M.Sc
 Pamen Kostrad/Kandidat Doktor Ilmu Hubungan Internasional
 FISIP Universitas Padjadjaran

Ketika mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika maka serta merta akan mengaitkannya dengan Pancasila, Burung Garuda, Perbedaan Suku, bahkan mungkin kita sudah lupa tentang asal usul Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Menghadapi kompleksitas globalisasi saat ini, memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi keharusan. Melalui tulisan singkat ini penulis ingin mengajak kembali melihat dengan singkat dan cepat (quick flash back) historikal Bhinneka Tunggal Ika, mengaitkannya dengan kemajemukan bangsa dan globalisasi, dan tantangan ke depan dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika di setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 dan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna: mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia; Mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan; Tidak saling menghina, mencemooh, atau saling menjelekkkan diantara sesama bangsa; Saling menghormati dan saling mencintai antar sesama; Meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia; dan Meningkatkan nilai kegotongroyongan dan solidaritas.

Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari Pancasila, semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kekompakan sebagai



Sumber : //en.wikipedia.com/

When we hear the words Bhinneka Tunggal Ika, we immediately relate it to Pancasila, Garuda, the variety of ethnics, or we may even have forgotten the origin of Bhinneka Tunggal Ika itself. Facing the complexity of the current globalization, holding firmly the principle of Bhinneka Tunggal Ika becomes a must. Through this brief article, I would like to ask readers to have a quick flash back of the history of Bhinneka Tunggal Ika, relate it with the diversity of the nation and globalization, as well as future challenges in maintaining Bhinneka Tunggal Ika in every life of the nation and the state.

Bhinneka Tunggal Ika is contained in the Government Regulation Number 66/1951 and Law of the Republic of Indonesia Number 24/2009 on Flag, Language, and State Symbol, as well as the National Anthem. Bhinneka Tunggal Ika means to

sebuah negara dan bangsa. Artikel singkat ini bukan merupakan justifikasi bahwa hal lain tidak demikian kuat berpengaruh dalam membentuk persatuan dan kesatuan, namun merupakan sebuah pandangan yang menguatkan faktor-faktor lain dalam negara dan bangsa. Pengaruh globalisasi menyediakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi segenap komponen bangsa secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Pengaruh globalisasi itu tidak dapat dibendung, ditahan, disaring bila tidak mengembalikan jati diri bangsa Indonesia, dimana jati diri itu salah satunya ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Kilas Balik Historikal Bhinneka Tunggal Ika

Mohammad Hatta dalam bukunya Bung Hatta Menjawab (1979) dituliskan asal-usul dan penjelasan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah merdeka semboyan itu dicantumkan dengan lambang yang dibuat Sultan Abdul Hamid (Pontianak) dan diresmikan pemakaian oleh Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950 sebagai semboyan pada lambang negara. Presiden Soekarno pada tanggal 22 Juli 1958 di Istana Negara menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan seloka buatan Empu Tantular yang berasal dari seloka "Bhina ika tunggal ika" yang memiliki pengertian "berjenis-jenis tetapi tunggal."

Mohammad Yamin dalam bukunya 6000 Tahun Sang Merah Putih (1954) menyatakan bahwa semboyan itu dinamai seloka Tantular karena kalimat yang tertulis dengan huruf yang jumlah aksaranya 17 itu berasal dari pujangga Tantular yang mengarang kitab Sutasoma pada Era Majapahit. Arti seloka itu adalah walaupun berbeda-beda ataupun berlainan agama, keyakinan dan tinjauan tetapi tinggal bersatu. Moh. Yamin menyatakan:

"...berbedalah itu, tetapi satulah itu. Seloka ini falsafah awalnya berasal dari tinjauan hidup untuk memperkuat

encourage an increasingly strong unity of Indonesia; to encourage an awareness of the importance of intercommunication for the strength of the unity; to not mutually insult or mock amongst nations; to mutually respect and love fellow human beings; to increase identity and pride as an Indonesian; and to increase the value of mutual cooperation and solidarity.

Bhinneka Tunggal Ika is therefore inseparable from Pancasila, the spirit of unity, togetherness and solidarity as a state and a nation. This brief article is not a justification that other things do not strongly affect the formation of unity, it is instead a strengthening opinion of other factors in the state and the nation. The globalization results in challenges and opportunities at the same time that all the nation's components must face together, and not individually. We cannot resist or select the impact of globalization if we do not bring back the identities of the Indonesian nation of which one of them is in Bhinneka Tunggal Ika.



Kakawin
SUTASOMA
Mpu Tantular

Penerjemah: Dwi Woro Retno Mestuti dan Hastho Bramantyo
Sumber : //diskusiwarungkopi.blogspot.com/



persatuan dalam kerajaan Keprabuan Majapahit, karena pada waktu itu aliran agama sangat banyak dan aliran fikiran demikian juga. Untuk maksud itu seloka itu disusun oleh Emu Tantular dengan tujuan untuk menyatukan segala aliran dengan mengemukakan persamaan. Persamaan inilah yang mengikat segalanya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika..."

Namun jauh sebelumnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diteliti oleh Prof. H. Kern pada tahun 1888 dalam *Verspreide Geschriften* (1916, IV:172) dimana semboyan itu awalnya tertera dalam lontar Purusadacanta atau Sutasoma (lembar 120) yang tersimpan di Perpustakaan Kota Leiden. Kemudian diteliti kembali oleh Muhammad Yamin pada tahun-tahun berikutnya dan tertuang dalam bukunya 6000 tahun Sang Merah Putih (1954). Sejarah semboyan itu menempuh proses evolusi dan kristalisasi mulai sebelum kemerdekaan, pergerakan nasional 1928 sampai berdirinya negara Republik Indonesia 1945 dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lambang negara sejak 8 Februari 1950.

Historical Flash Back of Bhinneka Tunggal Ika

Mohammad Hatta in his book, *Bung Hatta Menjawab* (1979), wrote the origin and explanation of Bhinneka Tunggal Ika. Following the independence, the slogan was mentioned with a symbol made by Sultan Abdul Hamid (Pontianak), and its use was officiated by the Cabinet of the United Republic of Indonesia on February 11th, 1950 as a slogan at the state symbol. President Soekarno on July 22nd, 1958 at the State Palace stated that Bhinneka Tunggal Ika was Emu Tantular's poem, which originated from Bhinneka Tunggal Ika which had the meaning of unity in diversity.

Mohammad Yamin in his book, *6000 Tahun Sang Merah Putih* (1954), stated that the slogan was named Tantular's poem because the sentence written in 17 words originated from the poet, Tantular, who wrote Sutasoma during the Majapahit era. The poem means unity in diversity despite differences in religions, faiths and critiques. Moh. Yamin stated:

"... be different but be united. The



Selanjutnya, Latar belakang pemikiran Bhinneka Tunggal Ika dapat dijelaskan melalui keterangan Mohammad Hatta dalam Bukuanya Bung Hatta Menjawab (1979) bahwa:

"Ke Ika-an di dalam Bhinneka Tunggal Ika, adalah berujud unsur-unsur kesatuan dalam kehidupan bangsa, dalam arti adanya segi-segi kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan dan kejiwaan yang bersatu dan dipegang bersama oleh segala unsur-unsur ke-Bhinneka-an itu. Unsur keanekaragaman tetap ada pada daerah-daerah dari berbagai adat dan suku. Akan tetapi, makin sempurna alat-alat perhubungan, semakin pesat pembauran putra-putri bangsa dan semakin bijak pegawai Pemerintah dan Pemimpin Rakyat melakukan pimpinan, bimbingan dan pengayoman terhadap rakyat seluruhnya, maka akan pastilah pula bahwa unsur-unsur ke Bhinneka an itu lambat laun akan cenderung meleburkan diri dan semangatnya kepada unsur ke-Ika-an. Bhinneka Tunggal Ika ini menegaskan pula, betapa pentingnya dihubungkan dengan Pancasila sebagai tali pengikat untuk memperkuat unsur ke-Ika-an dari adanya unsur-unsur ke-Bhinneka-an itu, dengan kenyataan bahwa dalam lambang negara kita dimana jelas tergambar Pancasila dengan Ketuhanan terletak dipusatnya, maka satu-satunya tulisan yang dilekatkan jadi satu dengan lambang itu adalah perkataan Bhinneka Tunggal Ika itu."

Bhinneka Tunggal Ika yang tertera didalam lambang negara itu memberikan makna tersirat dan tersurat. Namun kedua makna itu dapat dirangkum menjadi sebuah universalitas bahwa Bangsa Indonesia menghargai akan kemajemukan, sehingga kemajemukan itu bukanlah ancaman tetapi dijadikan sarana mempersatukan dengan tetap menghargai kemajemukan bangsa.

Akar sejarah dari falsafah Bhinneka

poem initially originated from the life critique to strengthen unity in Majapahit Kingdom, because at that time, there were many religions and thoughts. For this purpose, the poem was written by Empu Tantular with a purpose to unite all religions by bringing up the equality. The equality tied everything that is Bhinneka Tunggal Ika..."

However, long before it, the symbol of Bhinneka Tunggal Ika was first assessed by Prof.H.Kern in 1888 in Verspreide Geschriften (1916, IV:172, where the symbol was first mentioned in Purusadacanta or Sutasoma (sheet 120) kept at a library in Leiden. It was then re-assessed by Mohammad Yamin during the following years and mentioned in his book, 6000 tahun Sang Merah Putih (1954). The symbol history underwent an evolution and crystallization process since pre-independence, the 1928 national movement until the establishment of the Republic of Indonesia in 1945, and became an inseparable part of the state symbol since February 8th, 1950. Further, the background of the thoughts of Bhinneka Tunggal Ika can be explained through the explanation of Mohammad Hatta in his book, Bung Hatta Menjawab (1979), that:

"The unity in Bhinneka Tunggal Ika has the shape of unity elements in the life of the nation, in the sense of the presence of political, economic, cultural and spiritual life that unite and are jointly held by all elements of the unity. Diversity remains existent in regions with various traditions and ethnics. However, the more excellent the means of transportation, the faster the assimilation of the nation, and the wiser the government and the leaders in leading, guiding, and protecting the people, the more certain the elements of the unity slowly tend to merge themselves and their spirit to the unity. Bhinneka Tunggal Ika also affirms how important it is related to the elements of the unity from the presence of the unity elements, with the fact that in our state symbol, Pancasila is clearly pictured

Tunggal Ika adalah seloka dari Empu Tantular, 1350 M sebagaimana dinyatakan Muhammad Yamin dalam bukunya sebagai berikut:

"Apabila kita pelajari buah fikiran ahli filsafah Indonesia sesudah abad ke-XIV sampai kini, maka kagumlah kita kepada pertjikan otak ahli pemikir Empu Tantular, seperti dijelaskan dalam kitab Sutasoma yang dikarangnya dalam jaman kentjana keperabuan Majapahit pada pertengahan abad ke-XIV. Hal itu bukanlah suatu hal yang sudah mati."

Seloka Mpu Tantular secara lengkap adalah "Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa" yang memiliki arti: "berbedalah itu, tetapi satulah itu; dan didalam peraturan undang-undang tidak adalah diskriminasi atau dualisme." Seloka ini telah menyatukan segala aliran dengan mengemukakan persamaan, bahwa diantara berbagai fikiran, perbedaan agama, perbedaan filsafah namun ada juga persamaan yang menyatukan. Persamaan inilah yang mengikat segala jenis tetapi tetap tinggal bersatu. Perbedaan pikiran, pendapat, agama, aliran politik, kebudayaan dan sebagainya, jangan menimbulkan diskriminasi dan dualisme, melainkan sungguh sama nilai dan sama harganya (dinyatakan oleh Mpu Tantular dalam Sutasoma).

Seloka Bhinneka Tunggal Ika dalam konsep lambang menurut transkrip Sultan Hamid II (15 April 1967) dinyatakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai berikut:

".....ternjata masih ada keberatan dari beliau, jakni bentuk tjakar kaki jang mentjekram seloka Bhinneka Tunggal Ika dari arah belakang sepetinya terbalik, saja mentjoba mendjelaskan kepada Paduka Jang Mulia, memang begitu burung terbang membawa sesuatu seperti keadaan alamiahnya, tetapi menurut Paduka Jang Mulia

with God in the centre. So, the only writing attached in the symbol is the words Bhinneka Tunggal Ika."

Bhinneka Tunggal Ika as mentioned in the state symbol has both implicit and explicit meanings. Both can be summarized in universality that the Indonesian nation respects diversity, so that it is not a threat, instead it is a tool to unite the nation by still respecting the diversity.

The history of Bhinneka Tunggal Ika philosophy is Empu Tantular's poem in 1350 as stated by Muhammad Yamin in his book, as follows:

"When we learn the thoughts of Indonesian philosophers after the 15th century until present, we will be amazed with the thoughts of Empu Tantular, as explained in the book Sutasoma that he wrote during the era of Majapahit Kingdom in mid 14th century. It is not dead yet."

Mpu Tantular's complete poem reads, ""Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa", which means "be different, but be united; in the legislation, there is no discrimination or dualism." This poem has unified all differences by stating similarities that amongst various thoughts, different religions, different philosophies, there are unifying similarities. It is these similarities that bind all sorts yet remain united. The differences in thoughts, opinions, religions,



Seloka ini adalah hal jang sangat prinsip, karena memang sedjak semula merupakan usulan beliau sebagai ganti rentjana pita merah putih jang menurut beliau sudah terwakili pada warna perisai, selanjutnya meminta saja untuk mengubah bagian tjakar kaki menjadi mentjekram pita/mendjadi kearah depan pita agar tidak "terbalik" dengan alasan ini berkaitan dengan prinsip "djatidiri" bangsa Indonesia, karena merupakan perpaduan antara pandangan "federalis" dan pandangan "kesatuan" dalam negara RIS, mengertilah saja pesan filosofis Paduka Jang Mulia itu, djadi djika "bhinneka" jang ditondjolkan itu maknanya perbedaan jang menondjol dan djika "keikaan" jang ditondjolkan itulah kesatuan republik jang menondjol, djadi keduanya harus disatukan, karena ini lambang negara RIS jang didalamnya merupakan perpaduan antara pandangan "federalis" dan pandangan "kesatuan" haruslah dipegang teguh sebagai "djatidiri" dan prinsip berbeda-beda pandangan tapi satu djua, "e pluribus unum".

Transkrip Sultan Hamid II di atas menyatakan bahwa masuknya seloka Bhinneka Tunggal Ika pada pita yang dicengkram cakar Elang Rajawali Garuda Pancasila adalah sebuah sinergitas dari berbagai pandangan kenegaraan saat itu, yaitu paham federalis (kebhinnekaan) dengan paham kesatuan/Unitaris (Tunggal). Pandangan federalisme yang mengutamakan prinsip keragaman dalam persatuan, sementara itu pandangan unitaris yang mengutamakan prinsip persatuan dalam keragaman. Makna secara semiotika bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah "keragaman dalam persatuan dan persatuan dalam keragaman". Kata Bhinneka artinya keragaman; Tunggal artinya satu; dan Ika artinya itu. Maknanya yang beragam-ragam satu itu dan yang satu itu beragam-ragam. Makna "yang satu itu" yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

political tendencies, cultures, and so on should not result in discrimination or dualism, instead they should have the same value (stated by Mpu Tantular in Sutasoma).

Bhinneka Tunggal Ika in the concept of symbol according to Sultan Hamid II's transcript (April 15th, 1967) is as follows:

"..... there remains an objection from him, that is the claws that grip Bhinneka Tunggal Ika poem from the backside which looks inverted, I tried to explain to His Majesty that it is indeed the way a flying bird carries something, however, according to His Majesty, this poem is principal, because from the beginning, it is his recommendation to replace the red and white ribbon which according to him, is replaced by the shield's colors, then asked me to change the claws to grip the ribbon/to be the forward direction so that it is not "inverted" related to the nation's "identity" principle, as it is a combination between the "federal" and "unity" thoughts in the United Republic of Indonesia (RIS), I understand His Majesty's philosophy, so if "bhinneka" is highlighted, it means that the diversity is highlighted, and if "keikaan" is highlighted, it means the unitary republic is highlighted, that is the highlighted unitary republic, both must be united, because it is the symbol of the United Republic of Indonesia which is a combination of "federal" and "united" that we must hold firm as an "identity" and the principle of diversity in unity, "e pluribus unum".

The above Sultan Hamid II's transcript states that the words Bhinneka Tunggal Ika on the ribbon that the Garuda bird's claws grip is a synergy of various statehood thoughts at that time, including the federal concept and the unitary concept. The federal concept highlights the principle of diversity in unity, while the unitary concept highlights the principle of unity in diversity. In semiotics, Bhinneka Tunggal Ika means "diversity in unity and unity in diversity". Bhinneka means diversity, Tunggal means

Menelusuri sejarah lambang Negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan penegasan, bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan jati diri kebangsaan Indonesia yang tepat untuk menyatukan perbedaan. Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa segala perbedaan dipersatukan dalam kesatuan yang utuh bulat. Apapun jenis kelamin, agama, pandangan politik, suku, ras, tingkat pendidikan, status ekonomi, status sosial dan sebagainya dijadikan satu dalam pandangan kebangsaan. Prosesi yang demikian panjang oleh para pendahulu merupakan suatu nilai (norma), identitas dan kedaulatan pemikiran bangsa, bahwa kita sudah memiliki nilai luhur yang dibangun dengan pemikiran mendalam dan waktu yang tidak singkat. Bhinneka Tunggal Ika selayaknya digaungkan kembali guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia disetiap golongan generasi, level kemasyarakatan, pelaku pemerintahan, aparat keamanan dan seluruh komponen negara dan bangsa Indonesia.

Kemajemukan Bangsa dan Globalisasi

Sesuai dengan Konvensi Montevideo tahun 1933 maka sebuah negara berdaulat memiliki penduduk, wilayah, administrasi pemerintahan. Selanjutnya berkembang dengan ditambahkannya melakukan hubungan luar negeri. Dengan demikian maka ada empat hal penting yang harus bersatu utuh yaitu orang, wilayah, administrasi, dan hubungan luar negeri. Mari kita melihat uraian wilayah, penduduk, administrasi pemerintahan, dan hubungan luar negeri dalam uraian singkat dibawah ini, yang tetap melihatnya sebagai keutuhan implementasi Bhinneka Tunggal Ika.

Wilayah. Bangsa Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke (Barat ke Timur) dan dari Miangas sampai Pulau Rote (Utara ke Selatan). Menurut catatan terakhir BIG jumlah pulau Indonesia sekitar 17 ribu yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Perbedaan pulau-pulau ini yang

one, and Ika means that. It means what is diverse is one and what is one is diverse. The meaning of "it" is the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Studying the history of the state symbol Bhinneka Tunggal Ika affirms that Bhinneka Tunggal Ika is the identity of the Indonesian nation which is correct to unite diversity. From the above description, we can conclude that all differences are united wholly. No matter what the sex, religion, political view, ethnic, race, education level, economic status, social status and so on, they are all united in the nation's view. Such a long process by the predecessors is a norm, identity and sovereignty of the nation's thoughts that we have a noble value that was built with a deep thought in a long period. We should re-echo Bhinneka Tunggal Ika to strengthen the Unitary State of the Republic of Indonesia in every generation, level of society, security personnel and all components of the state and the nation of Indonesia.

The Nation's Diversity and Globalization

According to Montevideo Convention 1933, a sovereign country must have population, territory, government. In the development, it was added with foreign relations. There are therefore four important things that must united, including people, territory, government, and foreign relations. Let's see the description of the region, people, government, and foreign relations below, as a complete implementation of Bhinneka Tunggal Ika.

Territory. Indonesia stretches from Sabang to Merauke (West to East) and from Miangas to Rote Island (North to South). According to BIG's latest data, Indonesia has around 17 thousand islands consisting of big and small islands. During the early period of independence, the islands separated by water were a challenge for the national figures to maintain sovereignty and unity of the region. These separated islands must be united (Bhinneka Tunggal Ika). Through a long fight since the Juanda

NASIONALISME

dipisahkan oleh perairan antar pulau pada awal-awal kemerdekaan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para tokoh nasional guna menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Pulau yang berbeda-beda itu juga harus disatukan (Bhinneka Tunggal Ika). Melalui perjuangan panjang sejak Deklarasi Juanda (1957) dan akhirnya konsepsi Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelagic State) diterima pada saat sidang PBB mengenai UNCLOS tahun 1982. Yang perlu kita sadari adalah pulau-pulau yang demikian banyak saja berupaya untuk disatukan sebagai satu kebulatan utuh NKRI. Perjuangan menyatukan benda mati itu (karena dalam ilmu fisika pulau itu tanah dan dikelompokkan dalam benda mati) membutuhkan waktu sekitar 25 tahun. Akhirnya perjuangan panjang itu berhasil dan kemudian semakin menguatlah konsep wawasan nusantara.

Penduduk. Bila kita sekarang berpindah sudut pandang manusianya maka jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 adalah sekitar 237.641.326 jiwa (Sensus Penduduk 2010, BPS:2014). Penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119.630.913 jiwa dan perempuan sebanyak 118.010.413 jiwa. Seks Rasio adalah 101, berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan (BPS:2014). Jumlah suku bangsa sekitar 1.128 suku (BPS:2010). Selain itu jumlah bahasa sekitar 1.340 jenis bahasa (BPS, 2010). Sekian banyak penduduk tersebut melebur dan menjadi satu dalam pemilu 2014 menjadi 15 Parpol selain itu kelompok golongan putih dan bukan pemilih. Demikian banyak perbedaan tersebut sudah sekian lama menjadi kenyataan penting di Indonesia, bukan hanya penting di era modern sekarang ini. Semua perbedaan itu sudah sejak awal berupaya disatukan oleh para pemuda gagah berani dan visioner dalam pertemuan yang dirintis sejak tahun 1908 selanjutnya tercetus dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Keragaman bahasa disatukan pula yang kemudian kita mengenal satu bahasa tunggal Bahasa



Sumber : //taufiqolate.blogspot.com/

Declaration (1957), eventually Indonesia's concept as an archipelagic state was accepted at the UN meeting on UNCLOS in 1982. What we must be aware is that such numerous islands must be united as a unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The fight to unite inanimate objects (as in physics, an island consists of land and is categorized inanimate object) required 25 years. The long fight eventually succeeded and the archipelago concept was strengthened.

Population. In terms of population, in 2014, Indonesia's population totaled 237.641.326 (Population Census 2010, Statistics Central Bureau 2014), of which male population was 119.630.913 and female 118.010.413. Sex ratio was 101, meaning there were 101 men for every 100 women (Statistics Central Bureau 2014). The number of ethnics was 1.128 (Statistics Central Bureau 2010). In addition, there were 1.340 languages (Statistics Central Bureau 2010). Such a vast population merged and united in 15 political parties,

Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi (official language). Kita selayaknya sadar bahwa mulut dan ucapan saja telah diupayakan untuk disatukan sekalipun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika dalam Bahasa.

Administrasi Pemerintahan. Alangkah baiknya apabila kita mengingat lagi apa yang dikatakan Kuhn (dalam The Structure of Scientific Revolution Third Edition, 1996) bahwa fenomena adalah sekumpulan fakta. Fakta yang ada saat ini adalah negara terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (secara teoretis terkenal dengan trias politika oleh Locke: 1690; Montesqueieu: 1748) berjalan secara sektoral, dimana ketiga lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri, walaupun kadang kala terjadi sinkronisasi namun bukan karena integrated planning namun lebih cenderung tanpa sengaja (not by design). Dalam satu tahun lembaga-lembaga tersebut mengeluarkan aturan sebanyak 40-50 produk (sumber: www.hukumonline.com, www.setnegri.com). Jika dibayangkan sebagai bola golf maka dapat dilakukan driving dengan memuaskan karena demikian banyaknya bola yang tersedia. Namun bila itu dibayangkan sebagai untaian benang yang bersilangan satu dengan lainnya maka dapat dibayangkan akan terwujud benang kusut yang sulit terurai kembali.

Sebagaimana tata negara maka dibawah tiga lembaga tersebut terdapat lagi sub sistem-sub sistem yang demikian negara yang demikian banyak dan majemuk. Setidaknya setiap eselon menghasilkan lagi aturan detail dan rinci. Sehingga terbentuklah lapisan-lapisan (layers) dibagian bawah yang semakin menambah kusut. Sun Tzu (The Lost Art of War terjemahan Thomas Cleary:1997) mengatakan bahwa semakin banyak aturan dalam sebuah negara maka semakin kacauolah negara tersebut. Oleh karena itu perlu pula langkah Bhinneka Tunggal Ika dalam administrasi sehingga menghasilkan tingkah laku (behavior) tunggal berjiwa Bhinneka Tunggal Ika

non partisans and non voters in the 2014 general elections. Such diversity has long been an important fact in Indonesia, not just at present. Since the beginning, Indonesian brave and visionary youths fought to unite the diversity in meetings that were first initiated in 1908 and then stated in the Youth Oath October 28th, 1928. The diversity in languages was also united in one language that we know Bahasa Indonesia as an official language. We should be aware that the youths fought to unite our language despite different ethnics, religions, races, and groups. Bhinneka Tunggal Ika in language.

Government. It will be appropriate if we remember what Kuhn said (in The Structure of Scientific Revolution Third Edition, 1996) that phenomenon is a group of facts. The current fact is that a state consists of executives, legislatives, and judiciary (theoretically known as Trias Politica by Locke: 1690; Montesqueieu: 1748). These three institutions walk individually although sometimes synchronously. However, it is an integrated planning as it is not by design. Every year, these institutions issue 40-50 regulations (source: www.hukumonline.com, www.setnegri.com). By analogy, it is like golf balls to play driving. However, if we compare it with threat, it will be tangled that is difficult to be re-unraveled.

Under these three institutions, there are many sub systems. At least every echelon produce detailed regulations so that there are layers that make it more complicated. Sun Tzu (The Lost Art of War translated by Thomas Cleary:1997) stated that the more regulations in a country, the more complicated is the country. Bhinneka Tunggal Ika is therefore required in the government to produce a single behavior with the soul of Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity).

Foreign Relations. In establishing foreign relations, the external environment will provide challenges and opportunities at the same time. The challenges and opportunities will depend on the decision

(berbeda tetapi tetap satu).

Melakukan Hubungan Luar Negeri.

Dalam melakukan hubungan luar negeri maka lingkungan eksternal akan memberikan tantangan sekaligus peluang. Tantangan dan peluang itu tergantung pada persepsi aktor pembuat keputusan. Pasca perang dingin globalisasi menyatukan dunia yang luas seolah kecil. Informasi tersebar dengan cepat terlepas dari benar atau tidak. Negara yang memiliki dominansi dan hegemoni akan menjual bahkan memaksa identitas, norma dan nilai tertentu. Henry Kissinger menyatakan bahwa kadang dua wilayah yang berhubungan disatukan dan merasa bersatu dengan ide-ide barat yang sepenuhnya berbeda dengan negara-negara yang mengikutinya. Negara-negara Eropa telah jauh lebih modern dan dewasa dibandingkan dengan negara-negara pengikut ide tersebut. Dengan demikian perubahan sosial yang dilakukan tidak bersifat memaksa, cepat, dan total. Rekayasa sosial dilakukan dengan kesadaran, perlahan, dan terkonsepsi dengan baik sehingga menghindari kerusuhan dan kerusakan sosial.

Interest (kepentingan) menurut cara pandang kaum realis pada disiplin ilmu hubungan internasional adalah tentang kebutuhan (national interest are what states want or need) (Klotz dan Lynch, 2007:86). Interest senantiasa dipandang dari tujuan-tujuan praktis yang tidak pernah berubah, tetap, dan given, dan mencakup beberapa kombinasi dari survival, power, wealth, dan security (Reus-Smit dan Snidal, 2008:302). Bagi kalangan perspektif Konstruktivis maka kepentingan nasional

maker's perception. Post Cold War, the globalization unites the big world as if it is small. Information rapidly spreads whether it is correct or not. The state that dominates and has the hegemony will sell and even force certain identity, norms and values. Henry Kissinger has stated that sometimes, two related regions would be united and feel unified with western ideas totally different from the countries that followed. European countries are far more modern and mature compared to the countries that follow the idea. Thus, the social changes were not forced, but were fast and total. Social engineering was conducted with intention, slowly, and well-constructed to prevent riots and social damages.

According to the realists in international relations discipline, national interests are what a state wants or needs (Klotz and Lynch, 2007:86). Interests will always be considered from unchanged, permanent and given practical purposes, and include a combination of power, wealth, and security (Reus-Smit and Snidal, 2008:302). For the constructive perspective circle, national interests are influenced by power at the international system level (Bakry, 2013:39). The influence of the international system at the formation of the national



**BERBEDA-BEDA SUKU
TETAPI TETAP SATU INDONESIA**

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan pada level sistem internasional (Bakry, 2013:39). Pengaruh sistem internasional pada pembentukan kepentingan nasional bersifat sosial. Dengan demikian maka interest merupakan produk dari identitas (Wendt, 1992).

Selanjutnya Biersteker dan Weber (1996:15) menyatakan bahwa komponen-komponen kedaulatan seperti wilayah (territory), otoritas (authority), dan identitas (identity) terus berevolusi dan berubah. Bahkan Simons (2003) menyatakan lebih lugas lagi bahwa kini telah terjadi pergeseran era absolute sovereignty menuju era popular sovereignty sehingga implementasinya adalah kedaulatan bagi kepentingan rakyat.

Demikian pula dengan norma dimana sebelumnya norma adalah sesuatu yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi internasional dapat secara meyakinkan membentuk kepentingan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma-norma itu dalam kebijakan nasionalnya (Finnemore, 1996). Norma mempengaruhi perilaku dengan mengubah keyakinan para aktor tentang pemahaman kepentingan. Sehingga norma tidak saja menyangkut hal apa yang akan terjadi (what will happen), namun juga logika tentang perilaku apa yang pantas dilakukan (what behavior is appropriate) (Carlsnaes, Rise and Simmons, 2002:175).

Dari uraian teoretikal diatas maka pada akhirnya kita sendirilah yang menentukan apa yang pantas (appropriateness) dalam menanggapi kepentingan global yang telah menggeser makna identitas, kedaulatan, dan norma-norma yang telah pakem selama ini. Dengan demikian mengembalikan makna sebenarnya dari Bhinneka Tunggal Ika tidak terlepas dari keyakinan kita akan makna hakiki bahwa semboyan itu dibuat untuk menyatukan seluruh perbedaan, bersatu yang bulat utuh.

interests is social. Interests are therefore a product of the identity (Wendt, 1992).

Further, Biersteker and Weber (1996:15) stated that sovereignty components such as territory, authority, and identity continued to evolve and change. Simons (2003) even stated more simply that there is currently a shift from an absolute sovereignty era to a popular sovereignty era that the implementation is sovereignty for the people's interest.

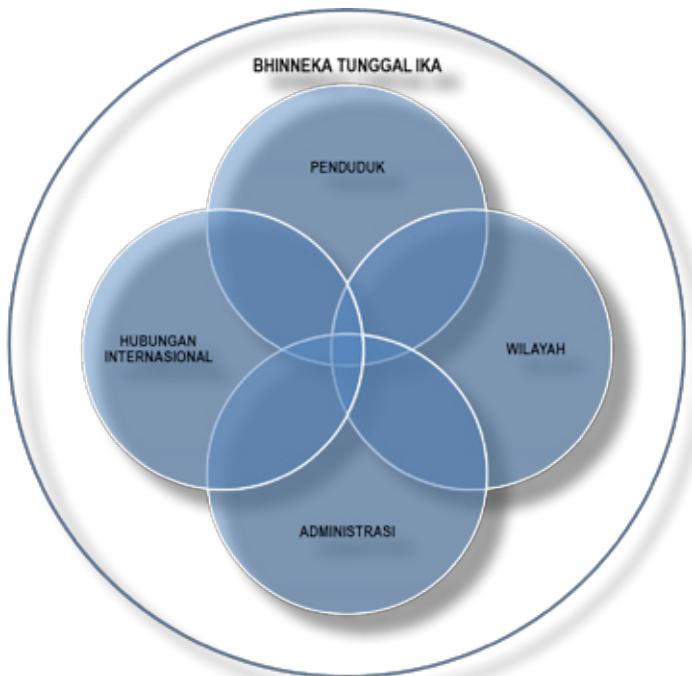
Norms that were previously something promoted by international organizations could decisively form national interests by encouraging the states to adopt the norms in their national policy (Finnemore, 1996). Norms affect the behavior by changing the actors' confidence on the understanding of the norms. Therefore, norms are not just related to what will happen but also by what behavior is appropriate (Carlsnaes, Rise and Simmons, 2002:175).

Based on the above theoretical description, it is we who decide what is appropriate in responding global interests that have shifted the meaning of identity, sovereignty, and norms. Thus, returning the real meaning of Bhinneka Tunggal Ika should not be separated from our confidence of the intrinsic meaning that the symbol was created to unite all differences.

The whole population should work to look for similarities and not differences that may tear down the state. We should create synchronized and inter-related regulations that provide effectiveness in the state administration and its implementation. The unity of all Indonesians was something that the colonialists were afraid of during the era of struggle to maintain independence. The unity of the military and the people, the unity of the military force and civilians (diplomats, politicians, etc) produced power such as one during Linggarjati, Renville, KMB meetings, etc. The unity of all levels of the society in the new era (new millennium) was clearly seen during the

Seluruh warga dan masyarakat berupaya mencari kesamaan bukan perbedaan yang akan meruntuhkan sendi negara. Mewujudkan suatu aturan yang sinkron dan saling berkaitan akan memberikan efektivitas penyelenggaraan negara dan implementasinya. Bersatunya seluruh manusia Indonesia inilah yang dulunya ditakutkan oleh para penjajah dimasa perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Bersatunya militer dengan rakyat (manunggal), bersatunya kekuatan militer dengan aparatur politik sipil (diplomat, politikus, dll) sehingga menghasilkan kekuatan seperti pada saat perundingan Linggarjati, Renville, KMB, dll. Bersatunya seluruh lapisan masyarakat di era baru (milenium baru) terlihat jelas pada saat Tsunami Aceh 2004 silam. Semua komponen bahu membahu, tidak ada ego sektoral, saling mengisi kekurangan, memiliki visi dan tujuan yang sama, memahami kedaulatan, kepentingan dan norma yang sama, sehingga mewujudkan efektivitas penanganan pasca bencana dan pembangunan kembali Aceh dengan cepat sehingga pulih kembali. Momentum ini merupakan analogi sederhana selain tentunya masih banyak contoh-contoh lain pada daerah dan waktu yang berbeda.

Sebagai kesimpulan kita harus bersama-sama menumbuhkan passion (rasa cinta) pada Bhinneka Tunggal Ika, bukan memaksakan melakukan hal tertentu atas nama kesatuan. Passion manusia adalah anugerah Tuhan. Generasi tua mengajarkan kepada generasi muda untuk menemukan kembali passion-nya akan Bhinneka Tunggal Ika. Mendidik generasi muda penerus bangsa dan negara agar tetap berdaulat dan utuh sehingga tidak menjadi "Jack of all trades, but master of none" (tahu sedikit sedikit tentang banyak hal tapi tidak menguasai apapun). Jayalah Indonesiaku, Bhinneka Tunggal Ika!***



Tsunami in Aceh in 2004. All components worked together, there was no sectoral ego, and they had the same vision and goals, understood the same sovereignty, interests and norms, to create effectiveness in handling the post disaster and rebuilding Aceh fast to recovery. This momentum is a simple analogy beside other examples in different places and time.

As a conclusion, we must jointly grow passion to Bhinneka Tunggal Ika, not to force to do something on behalf of unity. Passion is God's gift. The older generation teaches the younger generation to re-find passion to Bhinneka Tunggal Ika. We must continuously teach the younger generation so that the nation and the state remain sovereign and intact instead of being "Jack of all trades, but master of none". Be victorious Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika!***

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2005-2025

MAKING A STRATEGIC PLAN OF MINISTRIES/INSTITUTIONS FOR 2005-2025

Ditulis Oleh
Letkol Laut (S) Munawar, SE, M.Sc
Kasi Gardev Subdit Minlakgar C Ditjen Renhan Kemhan

PENDAHULUAN

Sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bernegara bangsa Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut dapat terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran, dilaksanakan pembangunan nasional oleh seluruh komponen bangsa, terdiri dari unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pembangunan nasional dapat terlaksana secara efektif, efisien dan terpadu bila didukung dengan rencana pembangunan untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yang masing-masing kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Visi, Misi dan rencana Kabinet Kerja Pemerintahan selain dilaksanakan pada tingkat nasional, dilaksanakan pula pada tingkat Kementerian yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Introduction

As contained in Preamble of Constitution 1945, the goals of the country are to protect the whole nation, to educate the life of the nation, and to implement the world order. In order to achieve the goals in an effective and efficient way and right on target, national development is conducted by all components, including the government and the people in both central as well as regional levels.

National development can be effective, efficient, and integrated if it's supported by long-term, medium-term, and short-term development plans. The plans are then contained in the documents of National Long-Term Development Plan (RPJPN), National Medium-Term Development Plan (RPJMN), and Government Work Plan (RKP). The Government Work Plan (RKP) which has been stipulated with the Presidential Regulation becomes a guideline to make the State Budget (RAPBN).

Medium-term planning made with the vision, mission, and plan of the government's Kabinet Kerja as the guideline, is implemented at a national level. In addition, it's also implemented at a ministerial scale, called the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L).

Making a Strategic Plan of Ministries/ Institutions (Renstra K/L)

Strategic Plan of Ministries/ Institutions (Renstra K/L) or Medium-Term Development Plan of Ministries/Institutions (RPJM K/L) is a five-yearly planning

RENCANA STRATEGIS

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Renstra K/L atau RPJM K/L adalah dokumen perencanaan K/L untuk periode lima tahunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai tugas dan fungsi K/L, yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Untuk memahami penyusunan Renstra, akan dibahas tentang kedudukan Renstra K/L dalam Sistem Pembangunan Nasional, Tahap dalam Penyusunan Renstra dan Proses Penyusunan Renstra K/L, dengan uraian berikut:

a. Kedudukan Renstra Kementerian dalam Sistem Pembangunan Nasional

Dalam kerangka sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen renstra K/L memiliki makna yang sangat strategis, karena merupakan penjabaran dari RPJP Nasional yang menjadi pedoman dalam penyusunan visi dan misi Presiden. Renstra K/L selanjutnya dijabarkan dalam RPJMN, serta dijabarkan secara lebih rinci dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) K/L. Selain itu Renstra K/L juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja K/L (Renja K/L).

Secara terperinci, keterkaitan antara Renstra dengan berbagai dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

1) Keterkaitan antara Renstra K/L dengan RPJMN.

Dalam penyusunan Renstra Kementerian berpedoman pada dokumen RPJM Nasional. Renstra Kementerian merupakan penjabaran RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

2) Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Visi Misi Presiden. Penyusunan Renstra Kementerian harus memperhatikan

document of ministries/institutions which contains the vision, mission, goals, strategy, policy, programs, development activities, regulations and institutions according to the tasks and functions of the ministries/institutions. It's made with the national Medium-Term Development Plan (RPJM) as the guideline and indicative.

To understand how to make a Strategic Plan, we will discuss the position of a Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) in the national development system, the phases in making a Strategic Plan, and the process in making a Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) with the following description:

a. Position of a Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) in the National Development System

In the frame of the national development planning system, the document of Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) has a very strategic meaning as it's a translation of the national Long-Term Development Plan (RPJP) which is a guideline in making the President's vision and mission. The Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) is then translated in more detail in the Annual Work Plan (RKT) of Ministries/Institutions. In addition, the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) also becomes a guideline in making the Work Plan of Ministries/Institutions. In detail, the connection between the Strategic Plan with various planning documents is as follows:

1) The connection between the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN).

The Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) has the National Medium-Term Development Plan (RPJM Nasional) as the guideline. It's a translation of the National Medium-Term Development Plan (RPJM Nasional) and indicative.

kesesuaian Visi dan Misi (platform) Presiden terpilih. Bagi Kementerian yang memiliki kontrak kinerja dengan Presiden terkait pencapaian visi dan misi Presiden, maka kontrak kinerja tersebut harus pula tercermin dalam dokumen Renstra K/L nya.

- 3) Keterkaitan antara Renstra K/L dengan Renja Kementerian.

Renja Kementerian disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Muatan yang terdapat dalam dokumen Renja K/L antara lain kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah, maupun yang dilaksanakan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Secara sistematis kedudukan Renstra K/L dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut (Pict 1) :

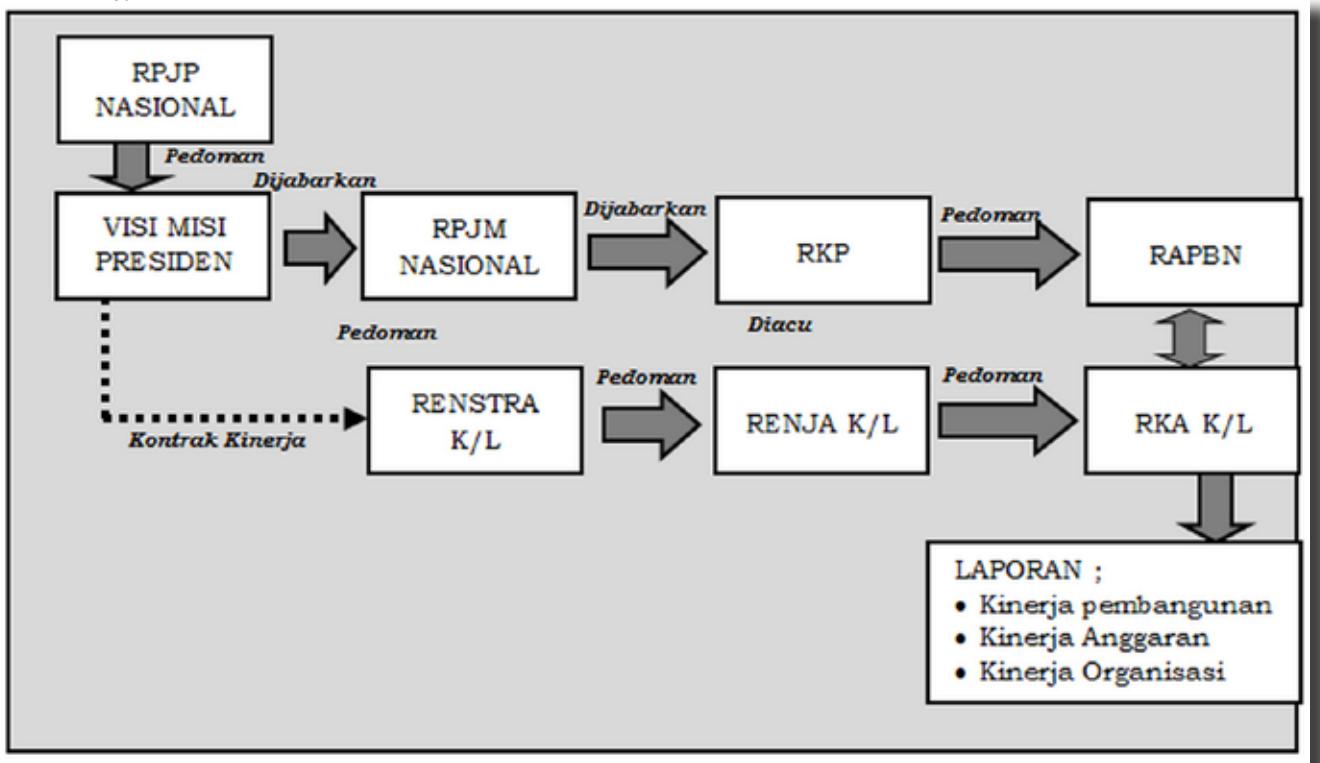
- 2) The connection between the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) with the President's vision and mission. The Strategic Plan of Ministries/ Institutions (Renstra K/L) must take the elected President's vision and mission (platform) into consideration. For ministries that have a work contract with the President in relation with the achievement of the President's vision and mission, the work contract must be expressed in the document of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L).

- 3) The connection between the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) and the Ministries' Work Plan (Renja).

The Work Plan of Ministries (Renja) is made with the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) as the guideline and refers to the national development priorities and the indicative ceiling. The Work Plan (Renja) of Ministries/Institutions contains among others policies, programs, and

Gambar Bagan Alur Keterkaitan Renstra K/L dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pict 1



RENCANA STRATEGIS

Keterangan :

- a) RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 tahun (2005-2025). RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi Presiden, yang kemudian dijabarkan menjadi RPJPM Nasional dan menjadi kontrak kerja dalam penyusunan Renstra K/L .
- b) RPJPM Nasional dijabarkan menjadi RKP.yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN. sebelum pada akhirnya ditetapkan menjadi APBN dengan persetujuan DPR. Dokumen RKA K/L akan digunakan sebagai input dalam penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Kementerian, Laporan Kinerja Anggaran K/L dan Laporan Kinerja Organisasi K/L.
- c) Renstra K/L menjadi pedoman dalam penyusunan Renja K/L dan juga menjadi pedoman penyusunan RKA K/L

b. Tahap dalam Penyusunan Renstra

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek, yang kemudian dituangkan dalam Dokumen RPJPN, RPJMN dan RKP, disusun dalam tahapan sebagai berikut :

- 1) Dokumen RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun (2005-2025) ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007;
- 2) Dokumen RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahunan, yang merupakan penjabaran dari RPJPN, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sesuai periode perencanaan lima tahunan, sebagai berikut :
 - RPJPN Tahap I (2005-2009)

development activities, implemented both directly by the government as well as by encouraging public participation.

Systematically, position of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) in the National Development Planning system can be shown as follows (Pict 1):

Picture of Connection between the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) in the National Development Planning System

Note:

- a) The National Long-Term Development Plan (RPJP Nasional) is a document of the national planning for a period of 20 years (2005-2025). The National Long-Term Development Plan (RPJP Nasional) is a guideline to make the President's vision and mission, which is then translated into a National Medium-Term Development Plan (RPJM Nasional) and becomes a work contract in making the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L).
- b) The National Medium-Term Development Plan (RPJPM Nasional) is translated into the Government's Work Plan (RKP) which is a guideline in making the State Budget Draft, before it's stipulated the State Budget with the approval of the House of Representatives. The Work and Budget Plan (RKA) of Ministries/ Institutions document will be used as an input in making the Development Performance Report of Ministries and the Budget Performance Report of Ministries/Institutions and the Organization's Performance Report of Ministries/Institutions.
- c) The Strategic Plan of Ministries/ Institutions (Renstra K/L) becomes a guideline in making the Work Plan (Renja) of Ministries/Institutions and Work and Budget Plan (RKA) of

- RPJPN Tahap II (2010-2014)
 - RPJPN Tahap III (2015-2019)
 - RPJPN Tahap IV (2020-2024)
- 3) Dokumen RKP yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahunan, yang memuat pemutakhiran program prioritas Presiden, ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

c. Proses Penyusunan Renstra K/L

1. Alur Penyusunan Renstra K/L

Alur Penyusunan Renstra K/L merupakan serangkaian proses/kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun dokumen Renstra K/L sesuai sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya, dengan berpedoman pada RPJMN, memperhatikan himpunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor sesuai tugas dan kewenangan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Selain itu dalam penyusunan Renstra Kementerian perlu didukung dengan hasil background study terkait potensi, permasalahan dan alternatif kebijakan pembangunan di setiap sektornya.

Mekanisme atau alur kegiatan yang dilalui dalam Penyusunan Renstra K/L meliputi 3 (tiga) proses, sebagai berikut:



Ministries/Institutions.

b. Phases in Making the Strategic Plan

Under Law No. 25/2004 on Long-Term, Medium-Term and Short-Term Development, contained in the National Long-Term Development Plan (RPJPN), the National Medium-Term Work Plan (RPJMN) and the Government's Work Plan (RKP) documents, phases are as follow:

- 1) The National Long-Term Development Plan (RPJPN) is a document of the national development planning for a period of 20 years (2005-2025) as stipulated with law No. 17/2007;
- 2) The National Medium-Term Work Plan (RPJMN) is a document of the national development planning for a period of 5 years as a translation of the National Long-Term Development Plan (RPJPN), stipulated with a Presidential Regulation according to the five-yearly period as follows:
 - RPJPN Phase I (2005-2009)
 - RPJPN Phase II (2010-2014)
 - RPJPN Phase III (2015-2019)
 - RPJPN Phase IV (2020-2024)
- 3) The Government's Work Plan (RKP) is a document of the national planning for a period of 1 year, which contains updating of the President's priority programs. Stipulated with a Presidential Regulation, the Government's Work Plan (RKP) is a guideline in making the State Budget Draft (RAPBN).

c. The Process of Making a Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L)

1. Plot of making a Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L)

The plot of making a Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) is a series of processes/activities to make the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) document according to the

RENCANA STRATEGIS

a) Proses Teknokratik.

Adalah suatu proses perencanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah guna untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra K/L. Rancangan Teknokratik Renstra K/L dalam penyusunannya mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN, oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan K/L selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian tujuan RPJMN. Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian juga harus memperhatikan evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan aspirasi masyarakat.

b) Proses Politik.

Merupakan proses penyusunan Renstra Kementerian yang diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden. Rancangan Renstra Kementerian juga disusun berdasarkan rancangan teknokratik Renstra K/L, dengan mempertimbangkan koordinasi bersama dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional.

c) Penetapan Renstra Kementerian.

(1) Menteri perencanaan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMN untuk didistribusikan kepada seluruh Kementerian, agar menjadi acuan bagi K/L dalam menyusun Renstra Teknokratik masing masing K/L.

Setelah terpilihnya Presiden baru, maka dilaksanakan proses penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMN menjadi Rancangan Awal RPJMN dengan menambahkan penjabaran

sector of their tasks and authorities, with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) as the guideline, taking evaluation results of the development implementation in the sectors according to the tasks and authorities into consideration, and taking the public aspiration into consideration. In addition, the Strategic Plan of Ministries/ Institutions (Renstra K/L) must be supported by results of the background study related to the potentials, problems and alternatives of development policies in the respective sector.

Mechanism or plot of activities to make the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) includes 3 (three) processes as follow:

a) Technocratic Process.

It's a planning process using a scientific method and framework of thinking to analyze the objective condition by taking some development scenarios for the next plan period into consideration. The technocratic process produces a Technocratic Draft of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L), which refers to the technocratic draft of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN). The vision, mission, goals, strategy, policies, programs, and activities of the ministries/institutions for the next 5 (five) years must therefore focus on the achievement of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) goals. The technocratic draft of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) must also pay attention to evaluation of the development implementation in the sectors according to the tasks and authorities as well as the public aspiration.

b) Political Process.

It's a process of making a Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) which is harmonized with the President's vision, mission, and priority programs. The Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) is also made based on the

visi, misi, dan program prioritas Presiden Terpilih. Rancangan Awal RPJMN kemudian akan dikembalikan kepada pimpinan Kementerian untuk segera menyusun rancangan Renstra K/L disesuaikan dengan rancangan awal RPJMN tersebut.

(2) Rancangan Renstra K/L kemudian disampaikan kepada Menteri Perencanaan untuk dilakukan penelaahan terkait batasan muatan Rancangan Renstra K/L dan konsistensi antara Rancangan Renstra K/L dengan Rancangan Awal RPJMN. Hasil penelaahan kemudian digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RPJMN menjadi Rancangan RPJMN, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Nasional. Hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional tersebut, digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir RPJMN. Rancangan Akhir RPJMN pada akhirnya akan ditetapkan menjadi RPJM Nasional melalui Peraturan Presiden. Setelah RPJMN ditetapkan, selanjutnya dokumen RPJMN tersebut digunakan sebagai pedoman penyesuaian Rancangan Renstra K/L untuk kemudian ditetapkan

technocratic draft of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L), taking coordination with the regional governments into consideration to identify the job description to achieve the national goals.

c) Stipulating the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L).

(1) The Minister of National Development Planning makes a technocratic draft of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for distribution to all ministries for reference in making their respective Technocratic Strategic Plan.

(2) After the election of the new President, the Technocratic Draft of RPJMN was completed into an Initial Draft of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) by adding the translation of vision, mission, and priority programs of the elected president. The Initial Draft of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) was then returned to Ministers to make a draft of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) which is adjusted to the initial draft of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN).

(3) Draft of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) is then submitted to the Minister of National Development Planning for review in relation with the content limitation of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) and consistency between the Draft of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) with the Initial Draft of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN). Result of the review is then used for completing the Initial Draft of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) to become Draft of the National Medium-Term





menjadi Renstra K/L. Penetapan Renstra K/L, dengan Peraturan Menteri. Renstra K/L yang sudah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada :

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, untuk digunakan dalam proses evaluasi kinerja pembangunan dan review baseline.
- Menteri Keuangan, untuk digunakan sebagai dasar dalam review baseline.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk digunakan dalam proses evaluasi kinerja organisasi.

2. Waktu Penyusunan Renstra K/L

WaktupenyusunanRenstraKementerian sesuai Permen Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Development Plan (RPJMN), further used as the main material in the Meeting of the National Medium-Term Development Plan. Result of the meeting will then be used to make the Final Draft of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN), which will then be stipulated as the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) through a Presidential Regulation. After the stipulation of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN), the document will then be used as a guideline to adjust the Draft of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) to become the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L). It's stipulated with a Ministerial Regulation, submitted to:

- The Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency for use in the evaluation and review process of the development performance.
- The Minister of Finance for use as basis in review.
- The Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform for use in the evaluation process of the organization's performance.

2. Time to Make a Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L)

Under the Ministerial Regulation No. 40/2006 on Procedure to Make a National Development Plan, the Ministries' Strategic Plan is made at the last year of the last implementation of the on-going Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L). The Technocratic Draft of the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) is made from January to September. The Draft of the Strategic Plan of Ministries/ Institutions (Renstra K/L) as a completion of the Technocratic Draft of the Strategic

Pembangunan Nasional, pada masa tahun terakhir pelaksanaan

terakhir pelaksanaan Renstra K/L yang sedang berjalan. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Kementerian dimulai dari bulan Januari hingga September. Penyusunan Rancangan Renstra K/L yang merupakan hasil penyempurnaan Rancangan Teknokratik Renstra K/L dimulai bulan Oktober hingga Desember. Sedangkan untuk penetapan Renstra K/L dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden mengenai RPJMN.

KESIMPULAN

1. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara, dibutuhkan keterpaduan dari seluruh komponen bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Pencapaian tujuan tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk mencapai keterpaduan dibutuhkan perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yang dituangkan dalam RPJPN, RPJMN dan RKP.
2. RPJMN dijabarkan menjadi Renstra, dan kemudian dijabarkan lagi menjadi Renja K/L. Renstra Kementerian berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan K/L yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
3. Penyusunan Renstra Kementerian harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi Presiden terpilih. Renja Kementerian harus berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif.
4. Renja Kementerian menjadi dasar bagi K/L dalam menyusun RKA K/L.***

Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) is made from October to December. The Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) is stipulated no longer than 3 (three) months after the issuance of the Presidential Regulation on the National Medium-Term Development Plan (RPJMN).

Conclusion

1. To achieve the state's goals, the nation's all components must integrate to implement development. The achievement of the goals can run effectively, efficiently, and right on target. To integrate long-term, medium-term, and short-term development planning is required, which is contained in the National Long-Term Development Plan (RPJPN), the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the Government's Work Plan (RKP).
2. The National Medium-Term Development Plan (RPJMN) is translated into a Strategic Plan, which is further translated into a Strategic Plan of Ministries/Institutions. The Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) contains the vision, mission, goals, strategy, policies, programs and activities of the ministries/institutions, which is a translation of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and indicative.
3. The Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) must take adjustment with the elected President's vision and mission into consideration. The Work Plan of Ministries/Institutions must have the Strategic Plan of Ministries/Institutions (Renstra K/L) as the guideline and refers to the national development priorities and the indicative ceiling.
4. The Work Plan of ministries is a basis for ministries/institutions to make the Work and Budget Plan (RKA) of Ministries/Institutions.***

**PEMANFAATAN SARANA
PERTAHANAN
UNTUK PENINGKATAN PRESTASI
OLAH RAGA NASIONAL**

**TAKING ADVANTAGE OF DEFENSE
FACILITIES
TO INCREASE NATIONAL SPORTS
PERFORMANCE**

Ditulis Oleh
Letkol Laut (KH) Ir. Agus Wahyudi
Kasubbid Anes Bidrenkon, Puskon Baranahan
Kemhan.

Hidup diantara masyarakat dunia tentu tidak lepas dari saling melihat, menilai antara satu dengan lainnya. Saat ini penilaian sudah semakin detail dan beragam, artinya aspek-aspek yang dinilai semakin beragam kemudian diranking/ diurutkan mulai tertinggi sampai terendah, sebagai contoh daftar urutan tingkat korupsi, tingkat penghasilan penduduk/



As we live in the world society, we certainly see each other, judge each other. Our judgement is currently more detailed and various, meaning that there are more varied aspects to judge, which are then ranked from the highest to the lowest. For instance, there are list of corruption level, list of GNP, list of sports performance, etc. The cumulative of these aspects ranking is



GNP, tingkat prestasi Olah Raga, dll. Kumulasi dari pemeringkatan aspek-aspek tersebut adalah peringkat Harga diri dari suatu bangsa.

Bagi warga Negara Indonesia yang sudah mengalami beberapa era kepemimpinan mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde dan Reformasi maka akan sepakat bahwa saat ini harga diri bangsa

the ranking of a nation's pride.

Indonesians who have experienced some eras of leadership since the Old Order, the New Order, and Reform, would agree that the nation's current pride in terms of sports is decreasing. One of the indicators is the performance in the Olympic Games, Sea Games, and the last Asian Games 2014 in South Korea, in

OLAHRAGA & KESEHATAN

dinilai dari aspek prestasi Olah Raga peringkatnya menurun dari sebelumnya. Indikator dari hal ini salah satunya adalah prestasi dilihat dari hasil Olimpiade, Sea Games dan yang terakhir Asian Games 2014 di Korea Selatan Indonesia berada dibawah beberapa Negara Asean seperti Thailand, Singapura dan Malaysia.

Lima tahun kedepan di era pemerintahan baru, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana upaya peningkatan harga diri bangsa setidaknya untuk bidang olahraga. Kepedulian pada suara rakyat, tentunya suatu yang sangat mulia tetapi akan kurang bermakna jika suara yang diperhatikan hanya merupakan suara-suara tuntutan kepentingannya masing masing yang cenderung sebatas pemenuhan kebutuhan hajat hidup duniawi. Para Negarawan, cendekiawan, tokoh agama apapun sepakat bahwa yang namanya mengejar kepuasan dunia (nafsu) ibarat mengejar bayangannya sendiri semakin cepat dikejar semakin cepat pula larinya atau dengan kata lain tidak pernah akan terkejar/terpenuhi secara tuntas nafsu duniawi tersebut.

Hal inilah yang sangat dikhawatirkan oleh sebagian sesepuh bangsa jangan sampai para pejabat berwenang terjebak dengan permasalahan memenuhi hajat hidup (nafsu) duniawi rakyat semata, sehingga lupa atau minim memikirkan harga diri bangsanya sendiri. Sesaat lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, biasanya sebagian besar Instansi Pemerintah terkait akan sibuk menyiapkan segala sesuatunya untuk memenuhi kebutuhan acara tahunan tersebut, sehingga acara mudik ria bisa berlangsung dengan baik, Tentunya tidak salah, tetapi sesuatu hal rutin/biasa tetapi diupayakan dengan perhatian besar dan hal lain yang juga penting bahkan perlu dilaksanakan demi harga diri bangsa tidak mendapatkan porsi perhatian yang cukup.

Satu hal lain yang juga sangat dikawatirkan adalah jika demam

which Indonesia was ranked under some other Asian countries, including Thailand, Singapore, and Malaysia.

In the next five years during the era of the new government, the question is what the efforts are to increase the nation's pride at least in sports. Our concern to the people's voices is certainly noble, but it's less meaningful if we're only concerned with voices for their own interest that tends to only meet their worldly needs. Statesmen, intellectuals, religious scholars of any religion would agree that chasing worldly satisfaction is like chasing our own shadow, the more we chase the faster it runs. In other words, we can never chase it or fulfill our worldly needs entirely.

This is what the nation's figures are concerned of lest authorised officials are trapped in troubles of only fulfilling worldly needs that they forget to think about the nation's pride. We will soon celebrate Idul Fitri. Most of the government institutions are normally busy preparing everything to fulfill the needs of the annual celebration to make it run well. It's certainly not wrong. However, we must not pay a lot of attention to something routine/ordinary, while we pay less attention to something important that we need to implement for the sake of the nation's pride.

Another thing that we're very concerned is that democracy that the political elites are practising as seen in the media, becomes something that the people are bored of. They eventually don't care with what their representatives are doing and instead look for other things that please/entertain them more. The problem is if these things don't give any benefit to the people to catch up with. It will be very sad if the younger generation don't care with their pride, and it's even sadder if the current generation cannot be an exemplary of how we should be concerned.

Signs of such a condition can be seen in the television programs that people

demokrasi yang dipraktekkan oleh kalangan elit politik yang diramaikan lewat berbagai media akhirnya menjadi sesuatu yang membuat masyarakat justru jengah/bosan dan akhirnya tidak peduli dengan apa yang dilakukan para wakilnya, sehingga masyarakat justru mencari/ mencermati hal-hal lain yang lebih menyenangkan/menghibur. Yang jadi masalah adalah jika hal-hal yang menarik masyarakat tadi tidak memberi manfaat bagi pembelajaran masyarakat untuk mengejar ketertinggalannya. Sangat menyedihkan jika generasi muda tidak peduli pada harga diri bangsanya tetapi lebih sedih lagi kalau generasi tua tidak bisa memberi contoh untuk peduli pada hal ini.

Tanda tanda akan hal ini mungkin bisa dilihat dari semakin larisnya tayangan tayangan Stasiun Televisi yang pada jam-jam tertentu yang mestinya merupakan jam untuk penyampaian berita berita/informasi Nasional dan Internasional

watch more in certain hours. During these hours, national and international news/information (including sports) is supposed to be aired and children must study. However, adult/children sinetron programs are aired instead, of which the education values are questionable, including comedies that only contain jokes. There may not be any violation of the law but is there any need to broadcast such programs in a large portion for the younger generation, the generation whom we hope will be concerned to increase their nation's pride.

Learning from someone's success is not bad. We must take into consideration the success of Singapore, Vietnam and even Myanmar in developing their athletes. Developing athletes by selecting from ± 250 million of the Indonesian population should be much easier compared to other countries in South East Asia. The keys are honesty, persistence, seriousness, maximum efforts from the beginning, and fearlessness of getting tired. These qualities



OLAHRAGA & KESEHATAN

(termasuk Olah raga) serta bersama dengan waktu belajar anak/masyarakat tetapi justru di situlah ditayangkannya acara acara Sinetron remaja/anak yang nilai edukasinya pantas dipertanyakan, termasuk dalam hal ini acara komedi yang isinya tidak jauh dari senda gurau. Mungkin tidak ada pasal hukum negara yang dilanggar tetapi haruskah ini dipublikasikan dengan porsi sebegitu besarnya kepada generasi muda kita yang diharapkan peduli untuk mampu meningkatkan harga diri bangsanya tadi. .

Belajar dari keberhasilan orang bukan sesuatu yang jelek. Untuk itu keberhasilan Singapura, Vietnam bahkan Myanmar dalam membina atletnya, mestinya menjadi pertimbangan. Pembibitan atlet dengan memilih dari ±250 juta penduduk Indonesia ini mestinya jauh lebih mudah dibanding negara negara lain di Asia Tenggara, Kuncinya semua harus mau jujur, gigih serius, dan berusaha maksimal mulai dari awal, tidak takut capek (ora wedi rekoso/bahasa jawa). Hal ini hendaknya selalu ditanamkan pada generasi muda sedini mungkin. Pencarian bibit olahragawan bisa dilaksanakan dengan melakukan test bakat/kemampuan anak sejak dini seperti test kesehatan/medical test, kecepatan/speed test, kecerdasan/intelektual test, ketahanan/endurance tes dll. Setelah didapatkan anak-anak dengan kemampuan tertentu negara menjamin proses pembinaanya sampai menjadi atlet, serta masa depannya dengan jaminan hari tua yang pasti. Bagi yang tidak sampai jenjang karir juara yang menghasilkan materi cukup, Negara bisa memberikan reward berupa penilaian lebih untuk dinominasikan sebagai CPNS dll.

Demikian juga dengan ketersediaan peralatan olahraga. Pembangunan fasilitas latihan olah raga bisa digabungkan dengan fasilitas pertunjukan olah raga dapat dijadikan prioritas. Kalau suatu kota mampu membangun gedung DPRD. Kantor Bupati/ Wali kota bagus, mestinya harus mampu membangun



Sumber ://korem072.com/

must be planted in the younger generation as early as possible. We can look for athletes by conducting an aptitude test, including medical test, speed test, endurance test, etc. After we have got children with certain capabilities, the government must guarantee the development process until they become athletes with guaranteed pension plan in the future. For those who don't achieve a career path from which they earn enough, the government can give a reward in higher assessment for them to be nominated as government officials, etc.

The same goes to the provision of sports facilities. Sports training facilities can be jointly constructed with show facilities, in which sports facilities are prioritized. If a city



gedung/fasilitas olah raga yang setara bagusnya, kalau perlu lebih bagus Kalau mampu membayar artis untuk acara-acara tertentu mestinya harus mampu membayar pelatih-pelatih olah raga yang handal. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tertarik berolahraga dan dari situ bisa diharapkan akan secara alamimuncul atlet berprestasi. Masyarakat mestinya peduli dengan hal ini dalam bentuk pemberian apresiasi yang lebih terhadap warga masyarakat yang berhasil di bidang Olah Raga,

Hal-hal ini mestinya yang menjadi pertimbangan dan bahan pembahasan DPR, Pemerintah, Media massa dan Masyarakat di samping hal-hal kebutuhan konsumtif, yang bersifat rutin yang tidak

administration can build a nice building for the Regional House of Representatives, the regent/mayor, it must also be able to build sports facilities of the same or even better quality. If it can pay artists for certain events, it must also be able to pay reliable sports instructors. This way, more people are hopefully interested in doing sports, and from there, outstanding athletes will naturally be found. The people should be concerned with this and give more appreciation to those who obtain high achievements in sports.

These things should be considered and discussed by the House of Representatives, the government, the mass media, and the society apart from consumptive, routine, and endless needs. For example, this year's

akan selesai tuntas sampai kapanpun. Contoh kebutuhan pangan tahun ini dipenuhi, tahun depan sudah harus memikirkan untuk memenuhi warga baru Indonesia yang jumlahnya lebih dari empat juta manusia, BBM tahun ini tercukupi tahun depan harus memikirkan tambahan untuk kendaraan baru selama setahun yang jumlahnya jutaan, artinya sampai kapanpun hal ini akan tetap menjadi bahan masalah, untuk diatasi, dan kalau ini menjadi bahan masalah utama nanti ibarat hewan sepanjang umurnya habis digunakan untuk memikirkan kebutuhan hidup/makannya saja.

Pemerintah dan DPR membuat Regulasi tentang upaya peningkatan prestasi Olah raga Nasional kemudian Pemerintah melaksanakan program peningkatan prestasi Olah raga Nasional, secara professional/ bertanggungjawab. Yang gagal dan tidak berprestasi siap diganti dengan segala sangsinya, selesaikan konflik -konflik kepengurusan organisasi olah raga secara tegas. Instansi Pemerintah terkait saling mendukung dan membantu Kementerian PU menyiapkan Fasilitas Olahraganya, Kementerian Kesehatan menyiapkan dukungan kesehatannya, Kementerian pendidikan menyiapkan pembibitannya, Kementerian Pertahanan/TNI menyiapkan pembinaan fisiknya, Kementerian keuangan menyiapkan anggarannya. Kementerian Olah raga menyiapkan pelatihannya dll, mungkin mirip mobilisasi umum untuk menciptakan kekuatan Nasional di bidang Olahraga. Pengusaha swasta membantu mendukung pendanaannya sekaligus promosi terutama produsen makanan/minuman sehat, peralatan/pakaian olah raga, atau apapun yang penting bukan rokok, sebab hal ini akan kontradiktif kalau rokok yang tidak menyehatkan badan digunakan untuk mendukung kegiatan Olah Raga yang mensyaratkan kesehatan Jasmani.

Sarana Pertahanan yang telah ada di Kemhan/TNI bisa digunakan untuk fasilitas latihan Atlet. hal ini mirip dengan kegiatan

need for food is fulfilled; next year, we must think of new Indonesian citizens totaling more than four million. Or, this year's gasoline consumption is fulfilled; next year, we have to think of additional gasoline for millions of new cars. It means that these will remain endless issues to solve. If these are main issues, it's like animals that spend their whole life just to think of meeting their need of food.

The government and the House of Representatives must produce regulations on increasing the national sports performance, then, the government implements the program to increase performance of the national sports in a professional and responsible way. Those



Sumber : //kodimjogja.wordpress.com/

fisik di beberapa cabang Olah raga. Salah satu contoh yaitu fasilitas IPSC (Indonesia Peace and Security Center) yang ada di Sentul yang memiliki fasilitas lapangan sepak bola, kolam renang, menembak dll dengan standar Internasional lengkap dengan fasilitas akomodasi untuk personil/ atlet dan pelatih, dengan kualitas udara/ lingkungan yang cukup bagus, mungkin bisa digunakan untuk pemusatan latihan atlet guna menghadapi event tertentu, Hal ini dapat dilaksanakan melalui pembuatan KSO (Kerja Sama Operasi) antar Instansi.

Disamping itu peran media masa sangat penting. Media massa perlu lebih banyak menyiarakan kegiatan olah raga

who fail and don't make any performance must be replaced with all the sanctions, conflicts in sports organizations must be settled. Related government institutions must support each other and assist the Ministry of Public Works prepare sports facilities, the Ministry of Health prepare health support, the Ministry of Education prepare the younger generation, the Ministry of Defense/the Indonesian Armed Forces prepare the physical development, the Ministry of Finance prepare the budget, the Ministry of Sports prepare the training, etc. It's like public mobilization to create national power in sports. Private businessmen support the funding in particular healthy food/ beverage producers, sports equipment/



OLAHRAGA & KESEHATAN

prestasi, paket paket acara olah raga termasuk event-event kejuaraan olah raga mestinya lebih banyak diadakan/disiarkan sehingga terbangun suasana gemar berolah raga diseluruh lapisan masyarakat, Dahulu RRI sebagai corong bicara Pemerintah bisa membakar semangat pemuda untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan, alangkah mulianya jika sekarang ini ada media massa yang kreatif menyiarkan acara-acara yang mampu membakar semangat generasi muda untuk serius memikirkan masalah harga diri bangsa ini dengan berprestasi di bidang Olah Raga. Hal hal diatas merupakan sesuatu yang baik dan pasti membawa pengaruh positif terhadap produktifitas bangsa. Siapa lagi yang harus peduli kalau bukan kita, kapan lagi akan dimulai kalau tidak sekarang.***



wear producers, or anything other than cigarettes, as it will be contradictory if unhealthy cigarettes are used to support sports activities that require physical health.

Defense facilities at the Ministry of Defense/the Indonesian Armed Forces can be used for athletes training facilities, similar to physical activities in some sports. An example is the Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) facilities in Sentul which have an international-standard soccer field, a swimming pool, a shooting range. It also has an accommodation facility for the athletes/instructors with good air quality/environment. These facilities can be used for a training centre for athletes in certain events. It can be implemented through an Operation Cooperation between institutions.

In addition, the mass media plays an important role. The electronic media must broadcast more sports activities, including sports competitions to grow interest in sports in the society's all layers. RRI (the Radio of the Republic of Indonesia) was once the government's public relations to inspire the youths to fight for independence. It would be quite noble if there's a media that creatively broadcasts events to inspire the younger generation to seriously think about the nation's pride through sports achievements. The above description will definitely bring positive impacts to the nation's productivity. Who else will be concerned with the nation's pride if it's not us, and we must start now.***

KENAPA ISTILAH “ PENYANDANG CACAT ” DIGANTI MENJADI “ PENYANDANG DISABILITAS ” ?

**WHY IS THE TERM “HANDICAPPED PERSON” REPLACED WITH
“PERSON WITH DISABILITY”**

Ditulis Oleh
Erlin Sudarwati, SKM., MM
Kasubbag Datin Bag TU Pusrehab Kemhan



PENYANDANG CACAT

Istilah “penyandang cacat” sudah mulai akrab digunakan oleh masyarakat Indonesia, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam penggunaan istilah secara resmi oleh pemerintah. Istilah ini mulai resmi digunakan sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang

HANDICAPPED PERSON

The term “handicapped person” is familiar to the Indonesian people, both in daily conversation as well as official use by the government. The term has been officially used since the stipulation of Law No. 4/1997 on Handicapped Person. Under the Law, Handicapped Person is a person with physical and/or mental different abilities, which may disturb or be an obstacle or a constraint for the person to do activities properly, consisting of physically handicapped person, mentally handicapped person, and physically and mentally handicapped person.

However, the term “Handicapped

cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Namun, istilah "penyandang cacat" dalam undang-undang tersebut, belum sepenuhnya dipakai sebagai acuan dalam setiap produk perundangan. Beberapa istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan antara lain "warga Negara yang memiliki kelainan", "peserta didik berkelainan", dan "anak yang menyandang cacat". Hal ini dikarenakan penyandang cacat seakan menjadi subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan. Istilah "Cacat" berkonotasi sesuatu yang negatif. Kata "penyandang" memberikan predikat kepada seseorang dengan tanda atau label negatif yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya.

Oleh karena itu, istilah penyandang cacat harus diganti karena istilah tersebut mengandung nilai yang cenderung membentuk makna negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena 'tercela' atau cacat. Berangkat dari kondisi tersebut, perlu sebuah rekonstruksi istilah 'penyandang cacat' dengan cara partisipatif untuk menghasilkan istilah baru yang paling sesuai dan akomodatif bagi semua pihak.

Komnas HAM bekerja sama dengan kementerian Sosial dan lembaga terkait menggelar Semiloka Terminologi "Penyandang Cacat" Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat pada tanggal 8 - 9 Januari 2009 di Gedung Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Binda Daksa (BBRVBD), Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Setelah itu Komnas Ham menggelar "Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat" pada 19 - 20 Maret 2010 di Jakarta. Diskusi dihadiri oleh pakar hukum, pakar bahasa, pakar komunikasi, pakar filsafat, pakar HAM, pakar penyandang cacat, pakar psikologi, pakar isu kelompok rentan, perwakilan Kementerian Sosial,

Person" in the Law was not fully used as a reference in legislation. Some terms used in the education field include among others "citizen with different ability", "student with different ability", and "handicapped child". This is because handicapped person is considered a less empowered legal subject. The term "handicapped" has a connotation of something negative. The term "handicapped person" gives a negative predicate or label to a person that is handicapped in the whole personality.

The term "handicapped person" must therefore be changed as it tends to have a negative meaning. Handicapped people are considered a group of helpless, incapable, and troubled people because they are 'handicapped'. Based on such a condition, the term "handicapped person" needs to be reconstructed with a participative method to produce a new term, which is most appropriate and accommodative for all parties.

The National Commission on Human Rights in cooperation with the Ministry of Social Affairs and related institutions organized a Seminar on the "handicapped person" Terminology to Encourage Ratification of the International Convention on the Rights of Handicapped Person on January 8th - 9th, 2009 at Gedung Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Binda Daksa (BBRVBD), in Cibinong, Bogor, West Java. Afterwards, the National Commission on Human Rights held an Expert Discussion to select a Terminology to Replace the Term "Handicapped Person" on March 19th – 20th, 2010 in Jakarta. The discussion was attended by legal experts, linguists, communication experts, philosophers, human rights experts, handicapped people, experts of prone group issues, representatives of the Ministry of Social Affairs, and Commissioners of the National Commission on Human Rights. The focused discussion successfully found and agreed the terminology "person with disability" to replace the term "handicapped person".

Based on the seminar result, the

dan Komisioner Komnas HAM. Hasil diskusi terfokus berhasil menemukan dan menyepakati terminologi “penyandang disabilitas” sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil seminar oleh Komnasham dan Kementerian Sosial tanggal 29 Maret – 1 April 2010, telah sepakat bahwa istilah “penyandang cacat” diganti menjadi “Penyandang Disabilitas”.

PENYANDANG DISABILITAS

Istilah “Disabilitas” mungkin kurang akrab di sebagian masyarakat Indonesia, berbeda dengan “Penyandang Cacat”, istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan di tengah masyarakat. Istilah Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Disabilitas” belum tercantum. Disabilitas adalah istilah baru pengganti Penyandang Cacat. Penyandang Disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual.

Terminologi penyandang disabilitas terpilih karena alasan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
2. Mendeskripsikan fakta nyata.
3. Tidak mengandung unsur negatif.
4. Menumbuhkan semangat pemberdayaan.
5. Memberikan inspirasi hal-hal positif.
6. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.
7. Memperhatikan ragam pemakaian dan ragam pemakaian.
8. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.



National Commission on Human Rights and the Ministry of Social Affairs, on March 28th – April 1st, 2010, agreed that the term “handicapped person” be replaced with “person with disability”.

PERSON WITH DISABILITY

The term “disability” may be unfamiliar to the Indonesia people, unlike “handicapped person”, which is commonly known or used in the community. The term “disabilitas” in the Indonesian language absorbs the English word “disability/disabilities”. However, in Kamus Besar Bahasa Indonesia, the word “disabilitas” is not mentioned yet. Disability is a new term to replace “handicapped person”. “Person with disability” means an individual with physical or mental/intellectual limitation.

The term “person with disability” is selected for the reasons as follow:

1. It clearly describes the subject meant with the term.
2. It describes a real fact.
3. It does not contain a negative element.
4. It grows empowerment spirit.
5. It inspires positive things.
6. The term is not used yet by other parties to prevent any term confusion.
7. It considers the variety of users and uses.

9. Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi
10. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pemanis
11. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional
12. Memperhatikan perspektif linguistik.
13. Mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
14. Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan.
15. Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
16. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat.

NASKAH KESEPAKATAN

Pada tanggal 29 Maret - 1 April 2010, Kementerian Sosial menyelenggarakan pertemuan Penyusunan Bahan Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat. Pertemuan yang dilaksanakan di Grand Setiabudhi Hotel, Bandung, itu dihadiri 30 peserta yang mewakili berbagai lembaga/organisasi yang meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Komnas HAM, organisasi penyandang cacat, dan LSM pemerhati kecacatan. Para peserta pertemuan tersebut sepakat untuk mengganti istilah "penyandang cacat" dengan "penyandang disabilitas". Kesepakatan itu dituangkan ke dalam naskah kesepakatan yang menyepakakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa istilah penyandang cacat secara tentatif mempunyai arti yang bernuansa negatif sehingga mempunyai dampak yang sangat luas bagi penyandang cacat itu

8. It is rapidly absorbable and understandable by various communities.
9. It is representative, accommodative, and standard for the interest of the Convention ratification.
10. It is not a term that contains language violence or sweetener.
11. It considers harmony between the local and international terms.
12. It considers the linguistic perspective.
13. It contains respect to human dignity.
14. It describes equality.
15. It provides comfort for those called and those calling.
16. Considers the dynamics of the people development.

AGREEMENT TEXT

On March 29th – April 1st, 2010, the Ministry of Social Affairs held a meeting on Creating Ratification Materials for International Convention on the Rights of Handicapped Person. The meeting was held at Grand Setiabudhi Hotel, Bandung, and was attended by 30 persons who represented various institutions/organizations, including the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and Human Rights, the Ministry of Women Empowerment and Children Protection, the Ministry of Manpower, the Ministry of Social Affairs, the National Commission on Human Rights, handicapped people organization, and handicap-observers NGO. The meeting participants agreed to replace the term "handicapped person" with "person with disability". The agreement was mentioned in an agreement text that agrees the following points:

1. That the term "handicapped person" tentatively has a meaning with negative nuance so that it may broadly affect the handicapped person, particularly the substance of



sendiri terutama pada substansi kebijakan publik yang sering memposisikan penyandang cacat sebagai obyek dan tidak menjadi prioritas;

2. Bahwa Istilah penyandang cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
3. Berdasarkan hal tersebut, istilah penyandang cacat harus diganti dengan istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
4. Berdasarkan hasil pembahasan dalam seminar dan focus group discussion yang diselenggarakan oleh Komnasham dan Kementerian Sosial di Cibinong (tanggal 8-9 Januari

the public policy that frequently puts a handicapped person in a subject position instead of a priority;

2. That the term "handicapped person" in the perspective of the Indonesian language has a meaning with a negative connotation and is not in line with the main principle of human rights and contradictory to the nation's noble values that uphold the human dignity;
3. By virtue of it, the term of "handicapped person" must be replaced with a new term that contains more constructive philosophical values, in line with the human rights principle;
4. Based on the discussion result in the seminar and focus group discussion, held by the National Commission on Human Rights and the Ministry of Social Affairs in Cibinong (January 8th – 9th, 2009), at Hotel Ibis Jakarta (March 19th – 20th, 2010) and at Grand Setiabudhi Hotel Bandung

- 2009), di Hotel Ibis Jakarta (tanggal 19-20 Maret 2010) dan di Grand Setiabudhi Hotel Bandung (tanggal 29 Maret – 1 April 2010), disepakati bahwa istilah penyandang cacat diganti menjadi : “ Penyandang Disabilitas”.
5. Istilah Penyandang Disabilitas mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami merekomendasikan:
- Pemerintah dan DPR agar segera meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan menggunakan istilah “penyandang disabilitas” untuk menerjemahkan frase “persons with disabilities”;

(March 29th – April 1st 2010), it was agreed that the term “handicapped person” be replaced with “person with disability”.

5. The term “person with disability” has a broader meaning and contains inclusive values that go with the soul and spirit of the legal reform in Indonesia, and is in line with the substance of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) which has been agreed to be ratified.
6. Based on the above matters, we recommend that:
 - The government and the House of Representatives immediately ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in the shortest time by using the term “penyandang disabilitas” to translate the phrase “persons with disabilities”;
 - The government, legislators, academics, person with disability organizations, disability-observers



- Kalangan pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemerhati disabilitas, dunia usaha, media masa dan masyarakat luas lainnya agar berpartisipasi aktif untuk mensosialisasikan penggunaan istilah "Penyandang Disabilitas" sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

Kesepakatan tersebut dibuat dengan penuh kesungguhan atas dasar itikat baik demi mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang Disabilitas di Indonesia. Kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani di Bandung pada tanggal 31 maret 2010.

Setelah itu, istilah baru tersebut dipromosikan dan disebarluaskan oleh Komnas HAM, Kementerian Sosial dan para pihak terkait ke masyarakat umum, terutama kalangan penyandang disabilitas. Ternyata upaya penyebarluasan tersebut cukup berhasil. Terbukti saat pengesahan Ratifikasi Hak Penyandang Disabilitas, istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti penyandang cacat sama sekali tidak dipersoalkan oleh para anggota DPR RI. Istilah penyandang disabilitas pelan tapi pasti bisa diterima dan diserap oleh masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini sejumlah media massa (cetak, elektronik, online) sudah mulai terbiasa menggunakan istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

Selain itu dengan adanya pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas maka berarti negara mengakui penggunaan istilah penyandang disabilitas sebagai bahasa baku di lembaran negara, peraturan-peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Semoga dengan pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, negara dalam hal ini pemerintah mampu mengedepankan pemenuhan HAM



Sumber : //beritadaerah.co.id/

organization, businessmen, mass media and the community to actively participate in socializing the term "person with disability" as a replacement of the term "handicapped person".

The agreement was made seriously based on a good intention to create respect, protection, and fulfillment of the human rights of persons with disabilities in Indonesia. The agreement was made and signed in Bandung on March 31st, 2010.

The term was then promoted and socialized by the National Commission on Human Rights, the Ministry of Social Affairs and related parties, in particular persons with disabilities. The socialization appears to be successful as proved by the endorsement of the Ratification of the Rights of Persons with Disabilities. The term "person with disability" as a replacement of the term "handicapped person" was not disputed by members of the House of Representatives. The term "person with disability" was definitely acceptable and absorbable by the Indonesian people. Let alone, a number of mass media (print, electronic, online) has got used to use the term "person with disability" to replace the term "handicapped person".

In addition, the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities means that the state acknowledges the use of the term "person with disability" as a standard term in the state gazettes, regulations and legislations in Indonesia. It is hoped that with the

penyandang disabilitas.

ISTILAH PENYANDANG DISABILITAS DI KEMHAN

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang yang mempunyai tugas pokok untuk merehabilitasi para penyandang disabilitas personel pertahanan, Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan), sudah mulai menggunakan istilah penyandang disabilitas untuk mengganti istilah penyandang cacat. Bahkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan yang baru yaitu Permenhan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, istilah penyandang disabilitas sudah digunakan dalam menjabarkan tugas dan fungsi Pusrehab Kemhan.

Selanjutnya, istilah penyandang disabilitas ini diharapkan dapat digunakan dalam segala lingkup yang berkaitan dengan istilah penyandang cacat, terutama dalam hal penulisan surat dinas maupun dokumen-dokumen yang ada di lingkungan Kementerian Pertahanan.***

endorsement of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the state, in this case the government, will prioritize fulfillment of the human rights of persons with disabilities.

THE TERM “PERSON WITH DISABILITY” AT THE MINISTRY OF DEFENSE

As one of the government institutions of which the main tasks include to rehabilitate defense personnel with disabilities, the Rehabilitation Centre of the Ministry of Defense uses the term “person with disability” to replace the term “handicapped person”. In the new Regulation of the Ministry of Defense Number 58/2014 on the Organization and Structure of the Ministry of Defense, the term “person with disability” is even used to describe the tasks and functions of the Rehabilitation Centre of the Ministry of Defense.

The term “person with disability” is hopefully used in all scopes related to the term “handicapped person”, especially in official letters and documents at the Ministry of Defense.***



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN



KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Itjen adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang selanjutnya disebut Irjen. Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Itjen menyelenggarakan fungsi:

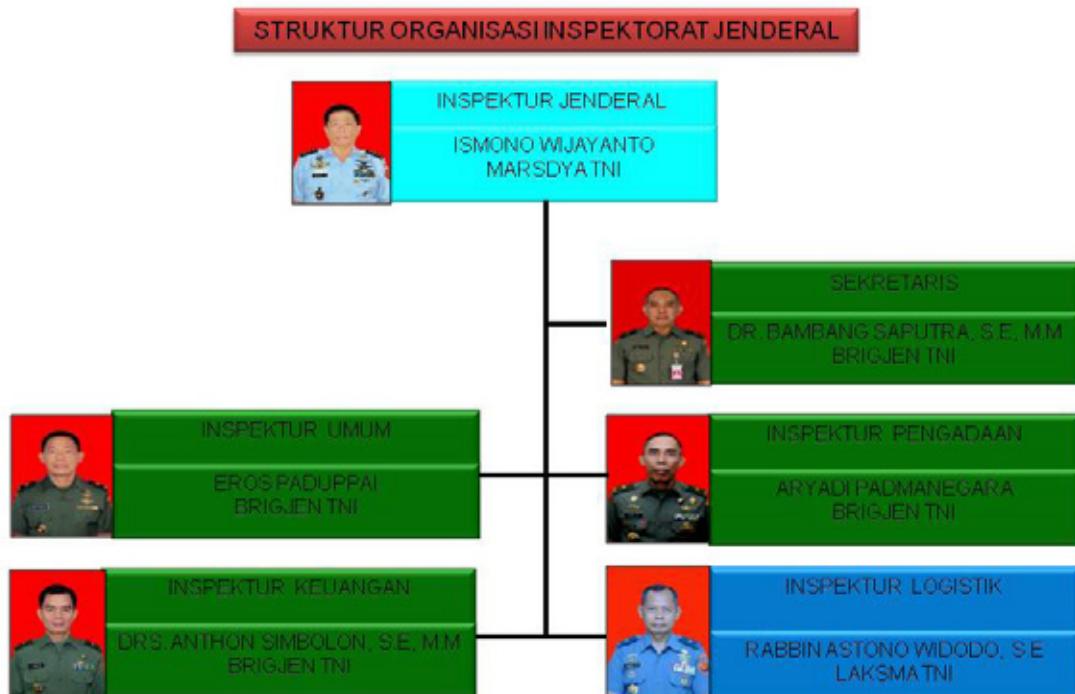
1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian; dan
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

STRUKTUR

Secara struktural Inspektorat Jenderal Kemhan terdiri dari Sekretariat, Inspektorat Umum, Inspektorat Pengadaan, Inspektorat Keuangan dan Inspektorat Logistik.

Sekretariat. Sekretariat Inspektorat Jenderal selanjutnya disebut Sekretariat Itjen adalah unsur pembantu Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal disebut Ses Itjen mempunyai tugas memberikan pelayanan



teknis dan administratif Itjen.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Itjen menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran, laporan akuntabilitas kinerja Itjen, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Itjen, pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materil dan administrasi perbekalan, ketatausahaan dan kerumah tanggaan Itjen, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan, pengelolaan data, informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Itjen, pelaksanaan tugas lain melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Kemhan serta supervisi staf.

Sekretariat Itjen terdiri dari Bagian Program dan Laporan, Bagian Data dan Informasi, Bagian Analisa, Evaluasi dan Tindak lanjut, Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Umum. Inspektorat Umum

selanjutnya disebut Inspektorat Umum adalah unsur pelaksana Itjen dipimpin oleh Inspektur Umum disebut Irum mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang pengawasan umum. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Inspektorat Umum menyelenggarakan fungsi penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan umum, pelaksanaan audit dan pengawasan di bidang kelembagaan, operasi, pendidikan, sumber daya manusia, dan peraturan perundang- undangan serta hukum dan disiplin, pengawasan serta pengusutan atas pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengkajian dan analisis serta bimbingan teknis di bidang tugas inspektorat, pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan pengawasan umum, penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan umum dan pelaksanaan urusan Administrasi Inspektorat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Umum dibantu oleh sejumlah tenaga Auditor, terdiri dari Kelompok



Auditor dan Subbagian Tata Usaha.

Inspektorat Pengadaan. Inspektorat Pengadaan selanjutnya disebut Inspektorat Ada adalah unsur pelaksana Itjen dipimpin oleh Inspektur Pengadaan disebut Irada mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang pengadaan barang dan jasa pertahanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Inspektorat Ada menyelenggarakan fungsi penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan pengadaan barang dan jasa pertahanan, pelaksanaan audit dan pengawasan pengadaan barang dan jasa dalam maupun luar negeri, pengawasan dan pengusutan atas pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengkajian dan analisis serta bimbingan teknis di bidang tugas inspektorat, pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan pengawasan pengadaan, penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan dan pelaksanaan urusan Administrasi Inspektorat. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat

Pengadaan dibantu oleh sejumlah tenaga Auditor terdiri dari Kelompok Auditor dan Subbagian Tata Usaha.

Inspektorat Keuangan. Inspektorat Keuangan selanjutnya disebut Inspektorat Ku adalah unsur pelaksana Itjen dipimpin oleh Inspektur Keuangan disebut Irku mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang keuangan pertahanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Inspektorat Ku menyelenggarakan fungsi penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan pertahanan, pelaksanaan audit dan pengawasan di bidang penganggaran, perpendaharaan, akuntansi, laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan, sistem prosedur keuangan dan pendapatan negara (Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/ PNBP) serta tuntutan perpendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pengawasan dan pengusutan atas pengaduan







masyarakat, pelaksanaan pengkajian dan analisis serta bimbingan teknis di bidang tugas inspektorat, pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan pengawasan pengelolaan keuangan pertahanan, penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan dan pelaksanaan urusan Administrasi Inspektorat. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Keuangan dibantu oleh sejumlah tenaga Auditor yang terdiri dari Kelompok Auditor dan Subbagian Tata Usaha.

Inspektorat Logistik. Inspektorat Logistik selanjutnya disebut Inspektorat Log adalah unsur pelaksana Itjen dipimpin oleh Inspektur Logistik disebut Irlog mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan, pemeriksaan serta pengusutan di bidang logistik pertahanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Inspektorat Log menyelenggarakan fungsi penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang pengelolaan logistik pertahanan, pelaksanaan audit

dan pengawasan di bidang logistik yang meliputi pergudangan, pendistribusian, pembekalan, pemeliharaan, penggunaan, penghapusan, administrasi dan inventori terhadap barang bergerak dan tidak bergerak, bekal, fasilitas dan jasa serta sarana dan prasarana pertahanan, pengawasan dan pengusutan atas pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengkajian dan analisis serta bimbingan teknis di bidang tugas inspektorat, pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan pengawasan pengelolaan logistik pertahanan, penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan dan pelaksanaan urusan Administrasi Inspektorat. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Logistik dibantu oleh sejumlah tenaga Auditor terdiri dari Kelompok Auditor dan Subbagian Tata Usaha.

Untuk mensukseskan Visi dan Misi Kemhan, Itjen berupaya secara konsisten melakukan sejumlah hal, yaitu melaksanakan peningkatan dan penajaman fungsi Itjen Kemhan melalui

efektivitas pelaksanaan pengawasan yang profesional, obyektif dan mandiri, sehingga mampu menjamin pelaksanaan tugas pokok organisasi Kemhan. Selain itu, Itjen juga meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran, serta ketataan terhadap peraturan yang berlaku dimulai sejak proses perencanaan serta melakukan upaya preventif terhadap terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini menjadi prioritas bagi Itjen dalam mekanisme pelaksanaan pengawasan. Upaya Itjen lainnya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi bersama institusi pengawasan lainnya seperti BPKP, BPK dan KPK, guna tercapainya sinergitas tugas dan fungsi pengawasan dalam rangka membentuk pemerintahan yang baik dan bersih atau Good Governance dan Clean Government.

REALISASI TUGAS ITJEN

Berbagai hal yang telah dilakukan oleh Itjen Kemhan dalam mengembangkan tugasnya antara lain adalah melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan, baik darat maupun laut dan pulau-pulau terluar perbatasan dengan negara-negara tetangga, seperti perbatasan darat di Tanjung Datu Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Papua serta pulau terluar di P. Rondo, P. Dana Rote, P. Fani, P. Jiew, P. Kawio dan P. Mangudu guna memberikan saran masukan kepada Menhan (Pemerintah) dalam meningkatkan fungsi pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan tersebut, serta memacu Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam turut membantu Pemerintah Pusat mengawasi dan membangun wilayah perbatasan melalui koordinasi langsung dengan Pemda.

Dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Pertahanan RI oleh BPK RI, Itjen Kemhan pada akhir tahun anggaran berjalan melaksanakan reviu Laporan admininstrasi keuangan terhadap Satker

U.O Kemhan dan TNI.

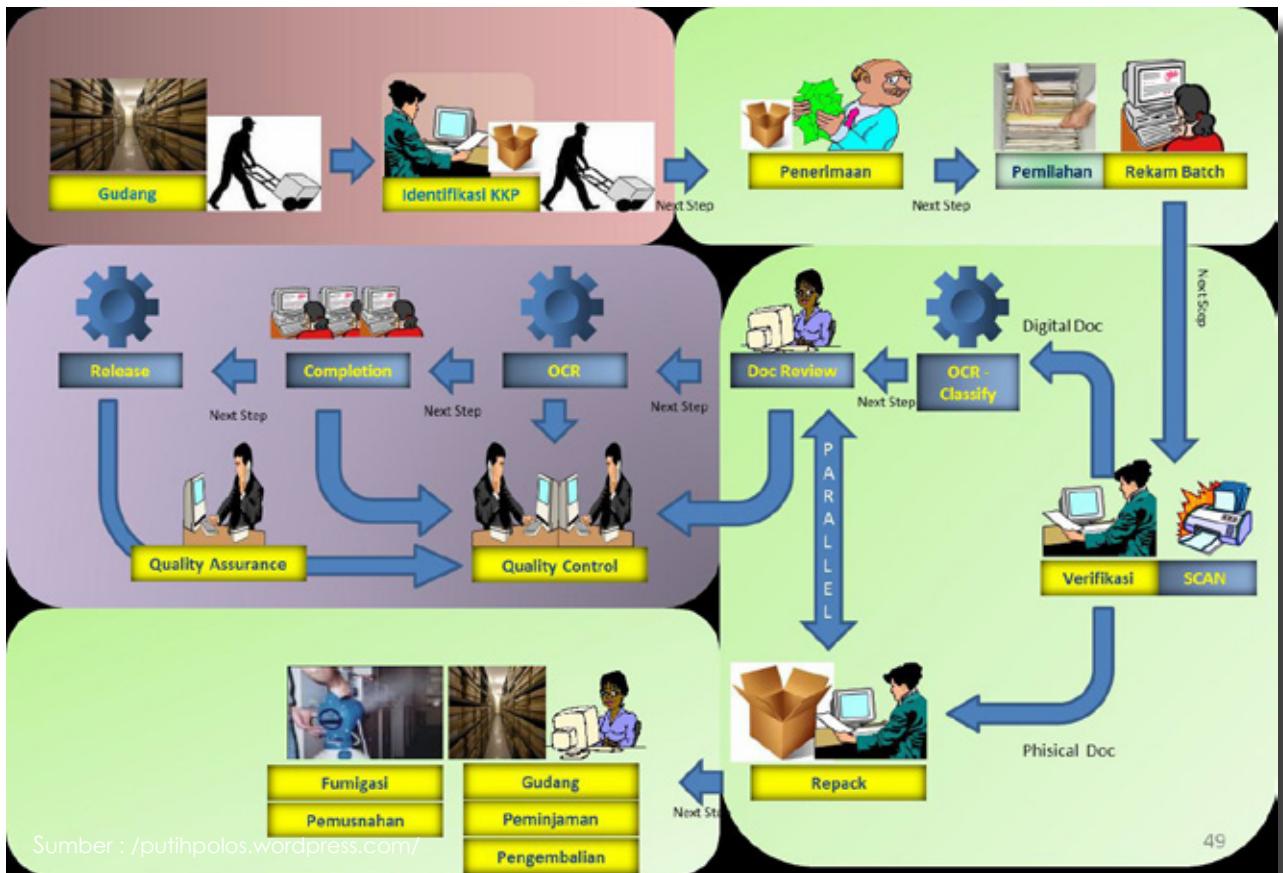
Itjen telah membuat nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemhan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan melibatkan mabes TNI dan Angkatan tentang pembentukan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa (KP3B) dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemhan. Kaitannya dengan masalah anggaran, Itjen telah melakukan pengawasan langsung terhadap proses perencanaan Kemhan khususnya dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran setiap tahunnya guna mengefektifkan dan mengefisiensi anggaran Kemhan yang terbatas.

Selain itu, Itjen juga melakukan evaluasi dan mengajukan perbaikan atau revisi terhadap peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menhan maupun Dirjen yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkup Pemerintahan maupun perkembangan situasi operasional di lapangan, seperti Organisasi Kemhan, PTPN Kemhan di daerah, Yanmasum serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lainnya di lingkungan Satker Kemhan.***



MINU KEMHAN

TIP MENCEGAH KETERLAMBATAN PENGIRIMAN NASKAH DINAS DAN RESPON SURAT



Salah satu pelayanan mendasar dalam surat menyurat adalah kecepatan pengiriman. Keterlambatan dalam pengiriman naskah dinas akan mempengaruhi keputusan pimpinan dalam mengambil kebijakan. Untuk mencegah keterlambatan pengiriman naskah dinas perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurusan dan pengendalian naskah dinas dilakukan secara cermat dan saksama dengan memperhatikan derajat, klasifikasi dan batas waktu.
2. Prosedur penerimaan dan pedistribusian naskah dinas dilakukan melalui pencatatan pada agenda dan ekspedisi berdasarkan prinsip "saat itu diterima, saat itu

dikirim", sehingga alur/informasi naskah dinas tidak terhambat.

Keterlambatan penyampaian naskah dinas juga dapat terjadi karena keterlambatan respon terhadap surat masuk, termasuk respon terhadap disposisi pimpinan. Untuk mencegah keterlambatan respon diperlukan adanya tindakan dari pimpinan/atasan berupa:

1. Pengawasan atau monitoring mengenai kecepatan respon terhadap isi naskah dinas sehingga tidak ada keterlambatan aksi tindak lanjut.
2. Pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada anggota yang terlambat dalam merespon naskah dinas.

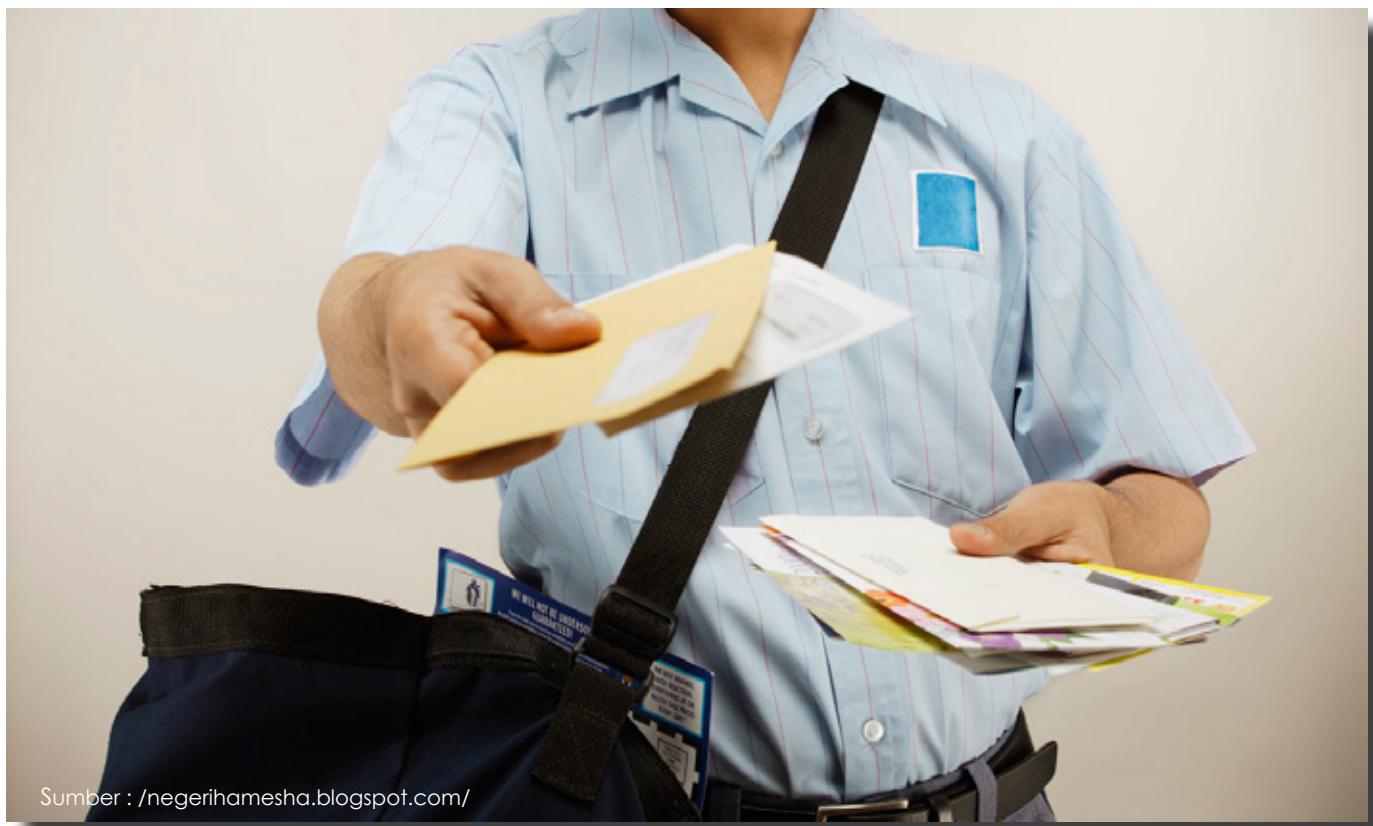
CARA MENDAPATKAN PETIKAN KEPUTUSAN STATUS, JABATAN DAN MUTASI PERSONEL YANG HILANG

Petikan naskah adalah lembaran yang merupakan salinan tetapi tidak mengutip seluruh isi, melainkan mengutip bagian yang penting dari naskah dinas aslinya yang ditandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang memetik naskah dinas asli. Untuk keputusan yang menetapkan status, jabatan dan mutasi personel disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ditandatangani oleh pejabat Biro TU Setjen Kemhan disesuaikan dengan

pangkat/golongan personel.

Petikan pada dasarnya dibuat dan diberikan hanya sekali. Namun dalam hal Petikan hilang dapat dibuatkan "Petikan 1", dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian
2. Surat keterangan tidak sedang dipergunakan sebagai jaminan peminjaman uang di bank dari Juru Bayar.



KAMUS KEARSIPAN

- Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemesyarakatan, dan perseorangan dalam



Sumber : /antara.com/

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara terus menerus dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Contoh arsip vital :

- Arsip Kebijakan strategis,
- Arsip Mou dan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri,
- Arsip aset negara,

- Arsip batas wilayah,
- Berkas perkara pengadilan,
- Dokumen pengelolaan keuangan,
- File personil.
- Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun/jarang digunakan.
- Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip

Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

- Arsip terjaga adalah arsip negara berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk kategori arsip terjaga.
- Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan seserta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
- Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
- Lembaga negara lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga kearsipan yang berbentuk lembaga pemerintah non kementeriaan yang melaksanakan tugas



Sumber :ahli-arsip.blogspot.com/



Sumber : /agung123.wordpress.com/

negara dibidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

- Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip.
- Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dinamis.
- Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

- Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip cara pemindahan arsip non aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kebadalembaga kearsipan.



Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers pada latihan Demonstrasi Pertempuran TNI AD di Baturaja didampingi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI dan Kasad, (Selasa 16/6 2015)



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Replika KRI-520 Teluk Bintuni dari Direktur Utama PT Daya Rada Utama Amir Gunawan seusai penandatanganan berita acara serah terima KRI-520 Teluk Bintuni, (Rabu 17/6 2015).



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menghadiri acara Hari Nasional Rusia. (Rabu 18/6 2015).



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai pembicara pada acara Shangrila Dialoque di Singapura, (Jumat 29/5 2015).



Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam Bidang Kesehatan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp M(K), (Senin 22/6 2015).



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menerima Duta Besar Republik Italia HE Federico Failla di Kantor Kemhan, (Jum'at 19/6 2015).







Kami Segera Keluarga Besar
**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Mengucapkan

Selamat Hari Raya
Idul fitri 1436 H
Mohon Maaf Lahir dan Bathin

